



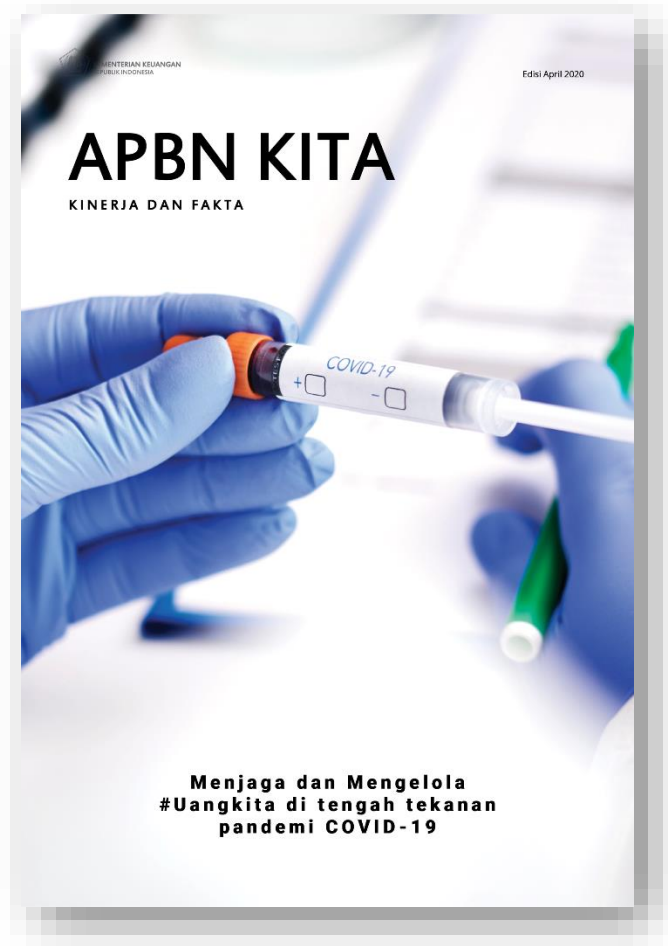
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONFERENSI PERS

APBN KiTa KInerja dan fakTA

Jakarta, 17 April 2020

www.kemenkeu.go.id/apbnkita



Perkembangan Makro dan Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2020

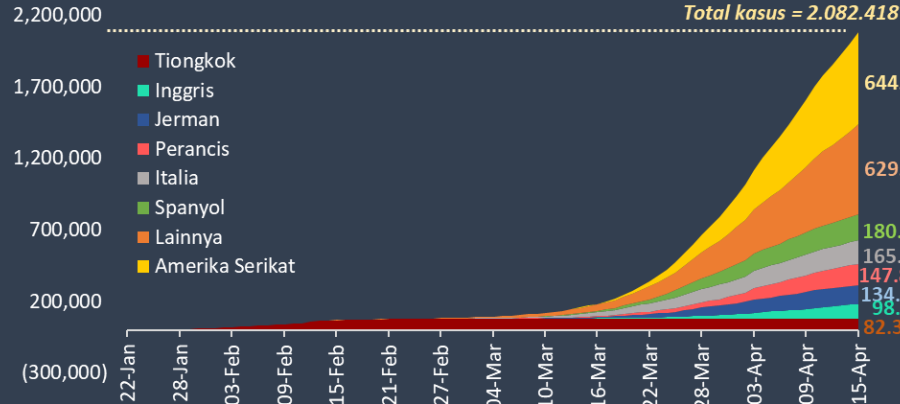
Jakarta, 17 April 2020



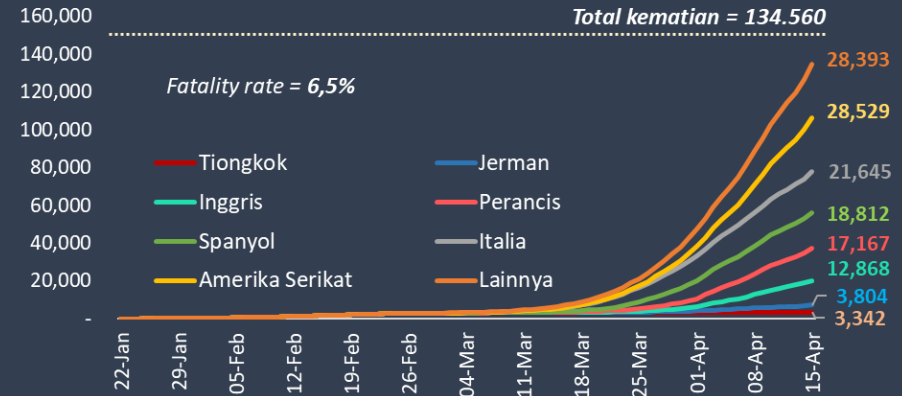
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PANDEMI COVID-19 TELAH MENYEBAR KE SELURUH DUNIA DENGAN LEBIH DARI 2 JUTA KASUS DAN 134 RIBU KEMATIAN. AS MENJADI PUSAT PENYEBARAN COVID-19 DENGAN TOTAL KASUS DAN KEMATIAN TERBANYAK DI DUNIA.

Total Confirmed Cases



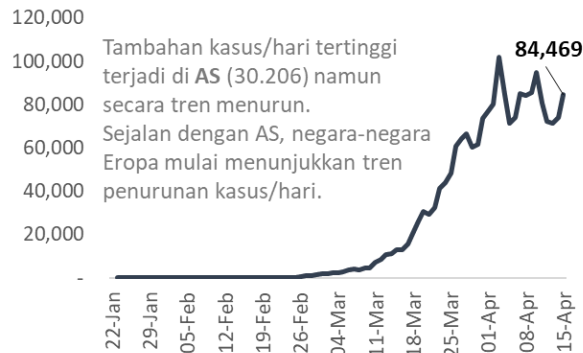
Total Death



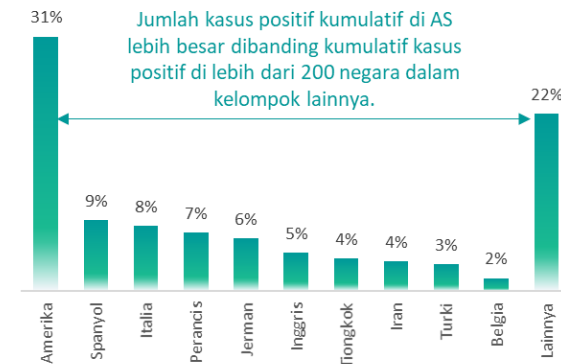
Penambahan Kasus Baru di Tiongkok (jumlah orang/hari)



Penambahan Kasus Baru di Luar Tiongkok (jumlah orang/hari)

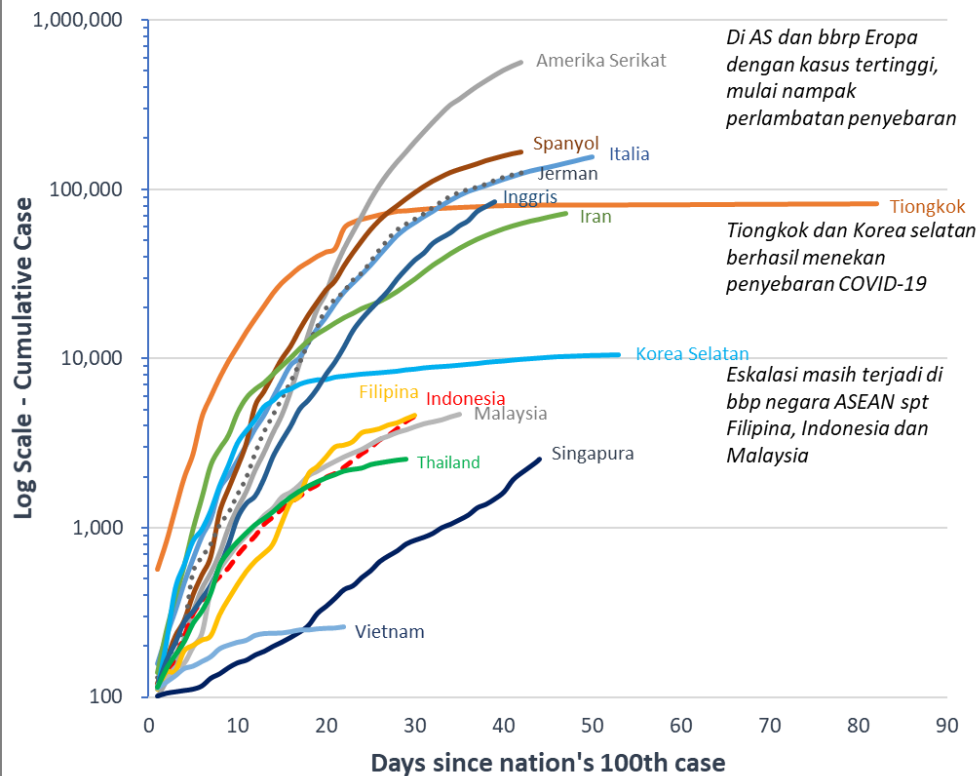


Distribusi Penyebaran COVID-19

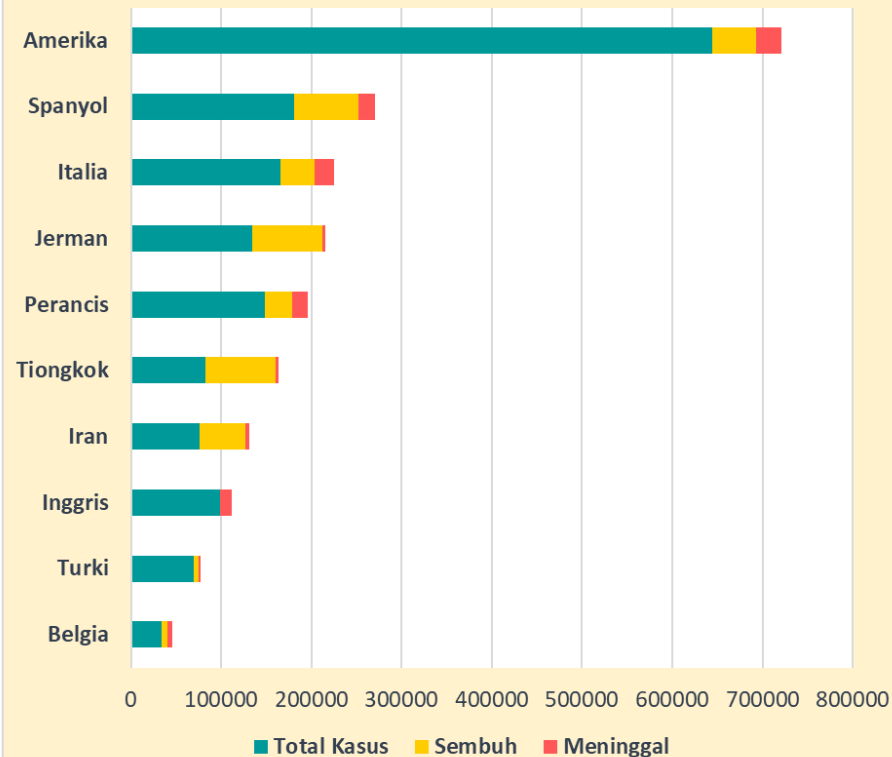


TRAJEKTORI PENYEBARAN DAN STATUS COVID-19 DI BERBAGAI NEGARA

COVID-19 Case Trajectory



Status COVID-19 di 10 Negara dengan kasus terbanyak



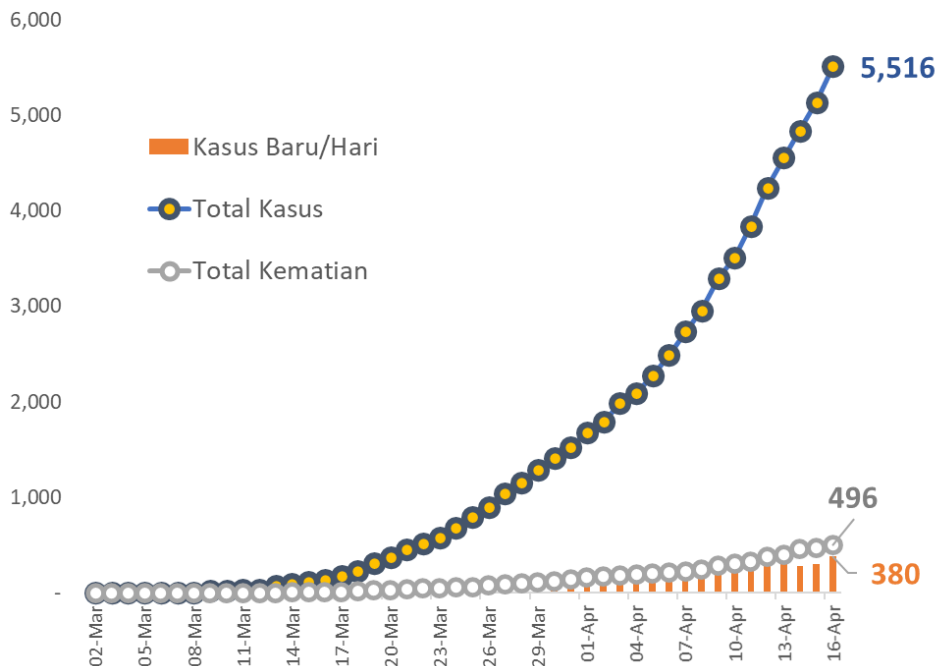
Sumber: [worlometers.info/coronavirus](https://www.worlometers.info/coronavirus) data per 14 April 2020, diolah



KEMENTERIAN KEUANGAN

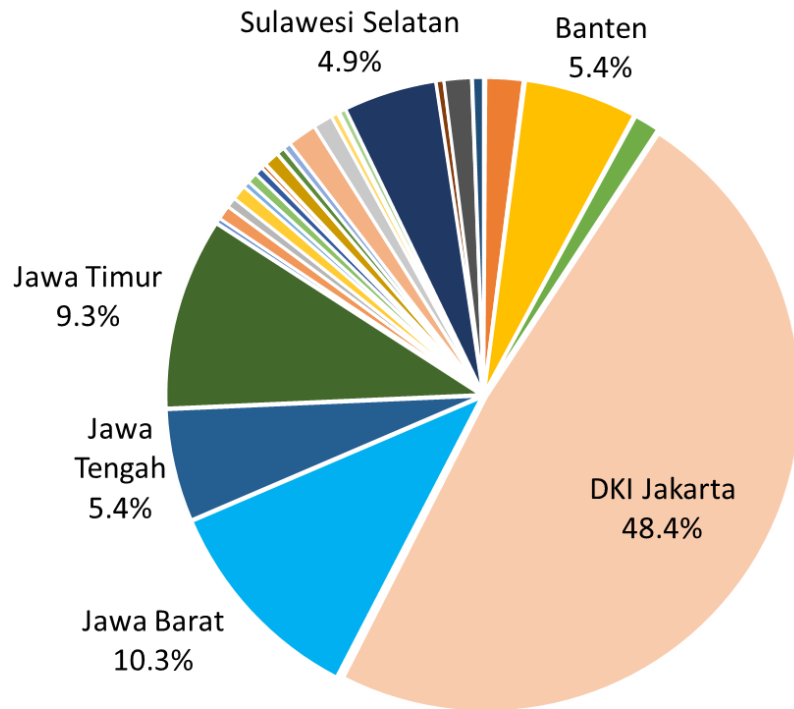
UPDATE CORONAVIRUS (COVID-19) DI INDONESIA

Total Kasus COVID-19 di Indonesia



Jumlah pasien sembuh: 548 orang
Fatality rate: 9,0%

Wilayah dengan Kasus COVID-19 Tertinggi di Indonesia
(persentase thd total)



SEKILAS PERKEMBANGAN COVID-19 DAN DAMPAK DOMESTIK



5.516

Jumlah orang dinyatakan positif Covid-19 (per 16 April 2020)



548

Jumlah orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 (per 16 April 2020)



496

Jumlah orang dinyatakan meninggal (per 16 April 2020)



33.001

Sebanyak 33.001 spesimen telah diterima dengan kasus negatif sebanyak 27.865 orang (per 16 April 2020)



34

Tersebar di 34 Provinsi.



12.703

Penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional.



6.800

Angka turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Tiongkok.



Rp207 bn

Kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, dengan sekitar Rp48 miliar kehilangan disumbang oleh penerbangan dari dan ke Tiongkok.



45,3

PMI Manufacturing Indonesia tercatat berkontraksi pada Maret 2020 di angka 45,3.



-3,7%

Impor Indonesia pada Q1 turun sebesar 3,7% (ytd).



-50%

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Menparekraf juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa setengah dari tahun lalu.



2,96%

Inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% (yoy) terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa komoditas pangan, meski terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara.



>1,5 juta

Pekerja dirumahkan (90%) dan di-PHK (10%) hingga 11 April. 1,24 juta dari pekerja sektor formal, 265 ribu dari pekerja sektor informal. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973759/jumlah-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-naik-jadi-15-juta>)

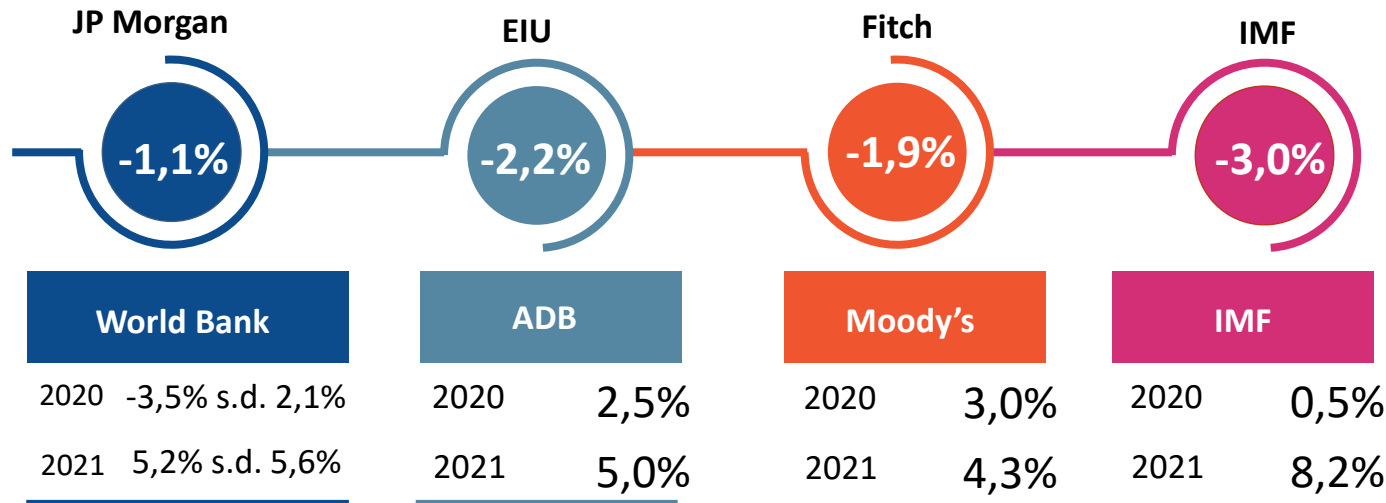
PEREKONOMIAN DUNIA AKAN MENGALAMI KONTRAKSI EKONOMI YANG SANGAT DALAM DI 2020

Proyeksi ekonomi dunia dipangkas signifikan dalam waktu singkat akibat pandemi Covid-19 yang terus melonjak
Berdasarkan *nowcasting* pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada dalam range 4.52 - 4.68% untuk Q1 2020

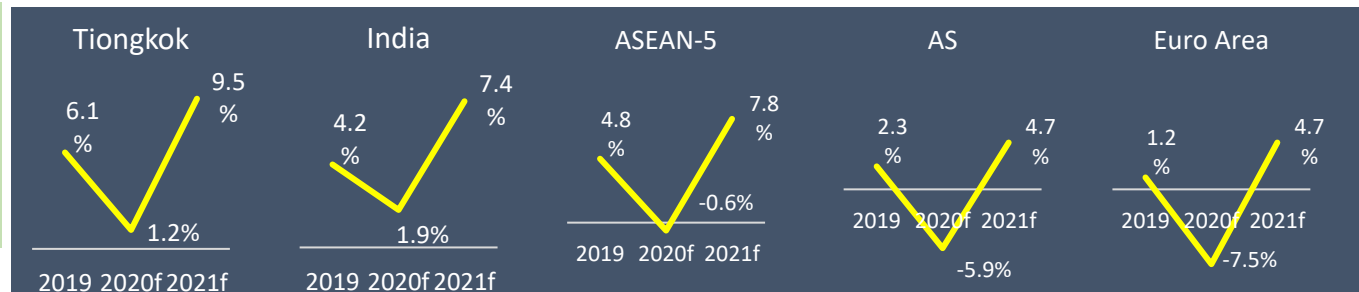
Pertumbuhan ekonomi global di 2020 diproyeksi terkontraksi. Tingkat ketidakpastian yang tinggi menunjukkan masih adanya risiko downside pada proyeksi.

Proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh berbagai institusi menunjukkan divergensi di tengah tingginya ketidakpastian.

Resesi/perlambatan ekonomi terjadi secara luas termasuk pada mitra dagang utama Indonesia



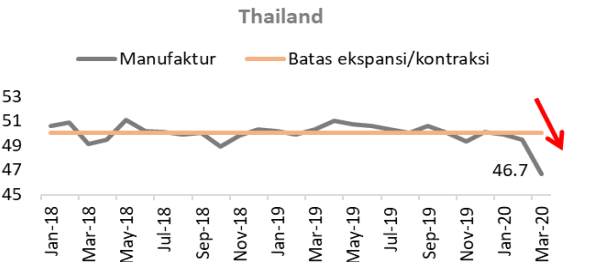
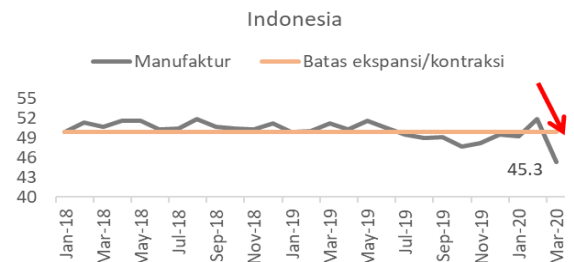
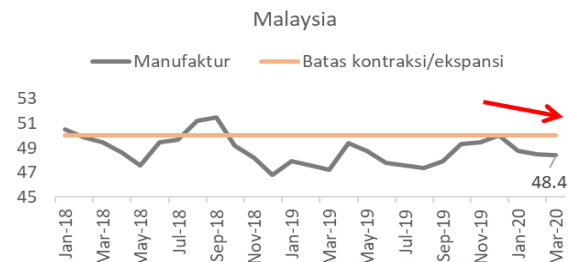
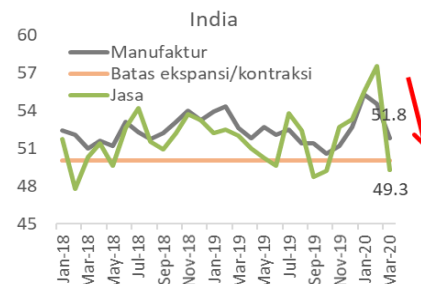
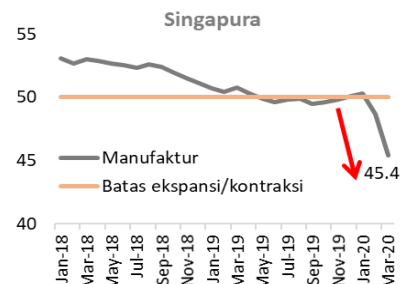
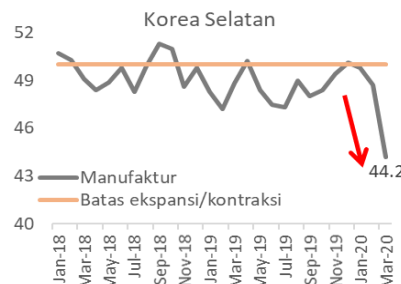
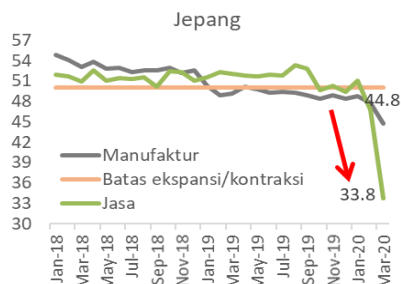
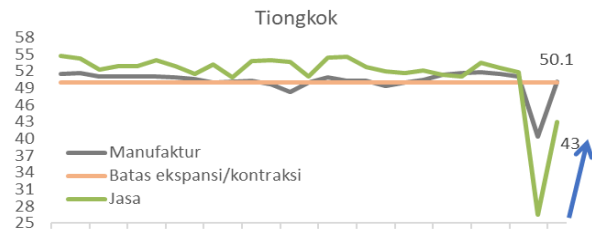
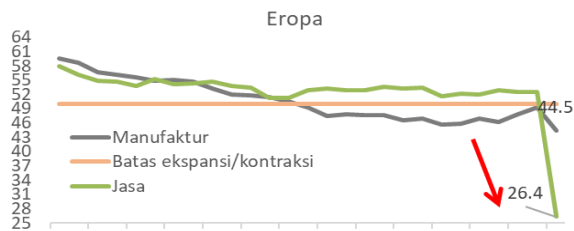
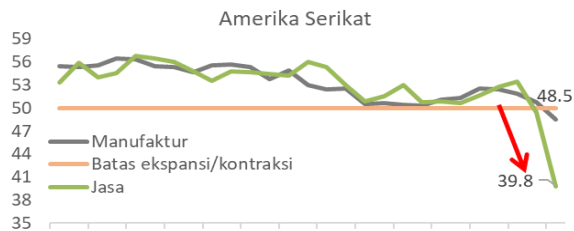
Berdasarkan *Nowcasting* pertumbuhan ekonomi domestik pada Q1-2020 diperkirakan berada dalam kisaran 4,52 – 4,68%



Sumber: IMF

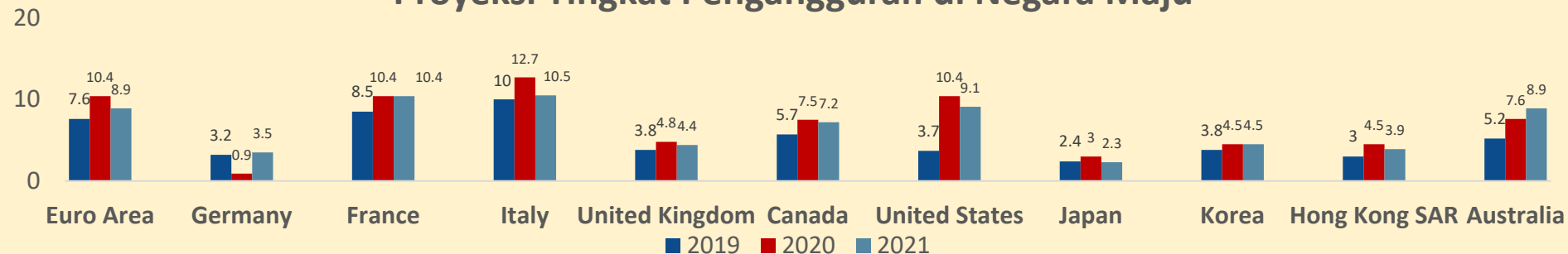


AKTIVITAS EKONOMI DI BERBAGAI NEGARA TURUN TAJAM PADA BULAN MARET 2020, BAIK MANUFAKTUR MAUPUN JASA. HANYA TIONGKOK YANG SUDAH MENUNJUKAN REBOUND.

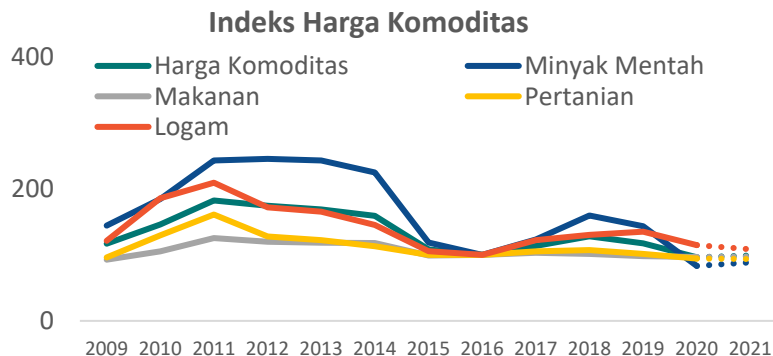


PANDEMI DIPERKIRAKAN AKAN MENDORONG PENINGKATAN PENGANGGURAN DI HAMPIR SELURUH NEGARA MAJU DAN MENEKAN HARGA KOMODITAS

Proyeksi Tingkat Pengangguran di Negara Maju

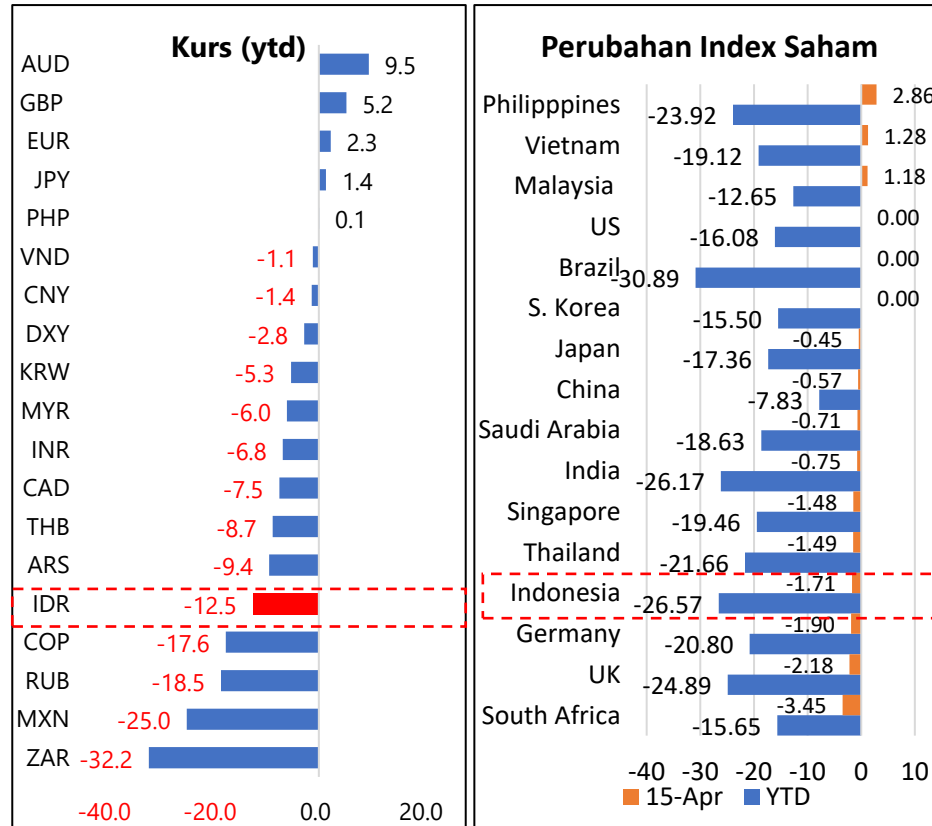


Harga komoditas diproyeksikan melemah seiring dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi



- Turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi serta perdagangan global juga berpengaruh terhadap penurunan pada harga komoditas.
- IMF memproyeksikan harga minyak mentah 2020 akan berada di bawah rata-rata tahun 2019.
- Harga komoditas metal turun seiring ekspektasi berkurangnya aktivitas industri. Harga komoditas makanan akan sedikit meningkat, didorong oleh ketatnya kondisi *supply* dan *trade deal* fase 1 antara AS-Tiongkok.
- Proyeksi akan lemahnya harga komoditas ke depan dapat menyebabkan eksportir komoditas mengalami tekanan pada pembiayaan dan aktivitas usahanya.

PERKEMBANGAN KURS MATA UANG DAN INDEKS SAHAM GLOBAL

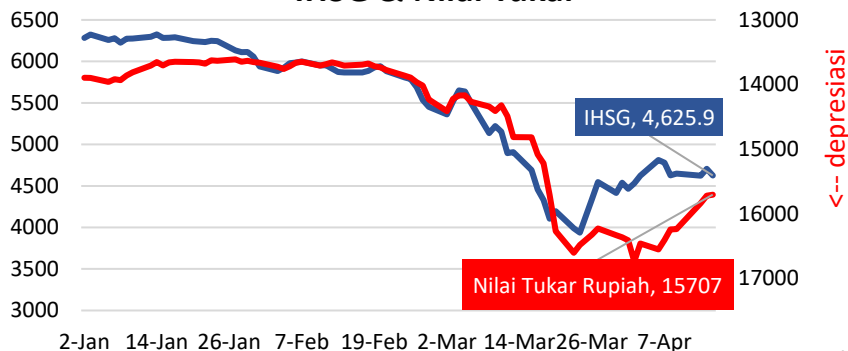


Per 15 April

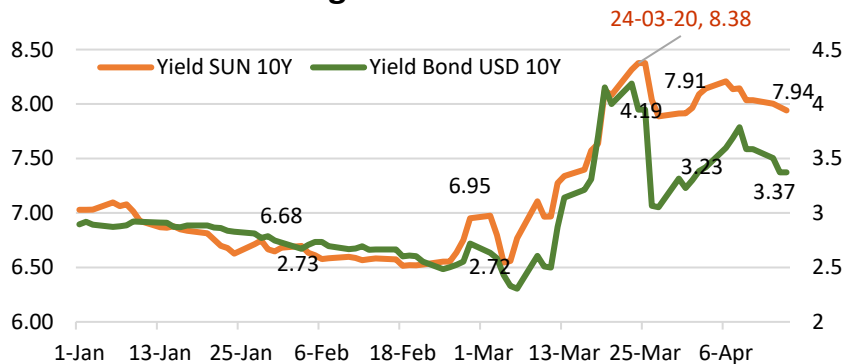
- Beberapa kurs mata uang masih melemah terhadap USD (secara YTD). Kurs Rupiah juga melemah secara YTD, namun dalam beberapa hari terakhir **Rupiah menguat** disaat dollar AS juga menguat terhadap mata uang lainnya. Penguatan ini dipengaruhi sentimen positif kebijakan moneter Bank Indonesia.
- Pergerakan **bursa global** dipengaruhi
 - Perlambatan penyebaran COVID-19 sebagai indikasi mulai membaiknya pandemi.
 - Investor mulai menunggu laporan kinerja keuangan perusahaan di bursa yang akan memberikan gambaran seberapa buruk imbas penyebaran COVID-19 terhadap perusahaan global.
- **IHSG tertekan** seiring aksi *wait and see* investor.

TEKANAN PADA INDIKATOR PASAR KEUANGAN DI BULAN MARET AKIBAT KEKHAWATIRAN INVESTOR TERHADAP DAMPAK EKONOMI GLOBAL COVID 19.

IHSG & Nilai Tukar



Yield Obligasi Pemerintah



	15 Apr 2020	Mar 2020	Des 2019	Feb-Mar '20 (mom)	Des'19 – 15 Apr (ytd)
IHSG	4625,9	4538,93	6299,5	-16.76%	-26,57%
Nilai Tukar	15.707	16.367	13.901	-14.99%	-12,99%
10 Y bond yield	7,94	7.91	7.06	0.96	0,88
10 Y USD bond yield	3,37	3,23	2,90	0,51	0,47
CDS Indo 5Y	211.80	210,4	67,72	116	144,08

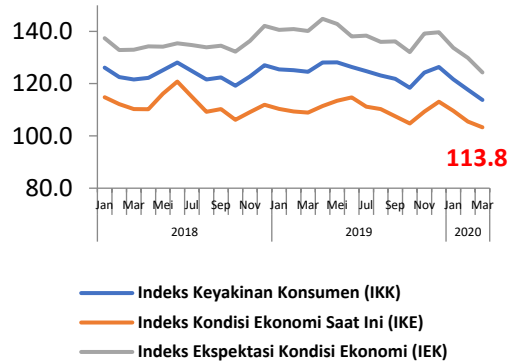
- Sejak minggu ketiga Februari, indeks saham dan nilai tukar mulai tertekan. Tekanan lebih besar di minggu ke-2 dan ke-3 Maret. Titik terdalam IHSG pada 24 maret (3.937,63), Rupiah pada 23 maret (16.608), mulai membaik di awal April
- Yield Obligasi Pemerintah terus meningkat di bulan Maret
- Tekanan pada pasar keuangan menyebabkan *outflow* Rp126,8 triliun di bulan Maret (outflow bulanan terbesar dari 2007)

Net Foreign Buying (Rp Triliun)

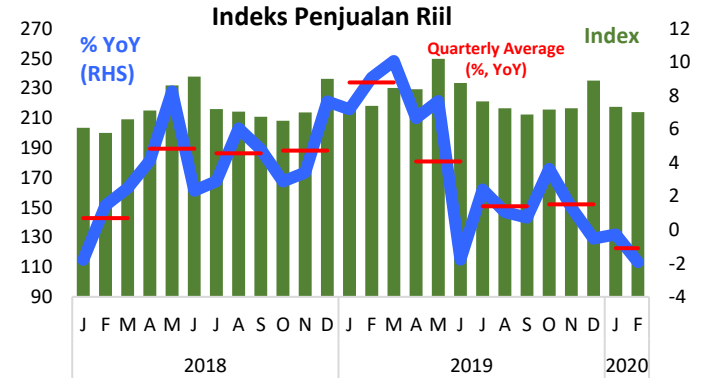
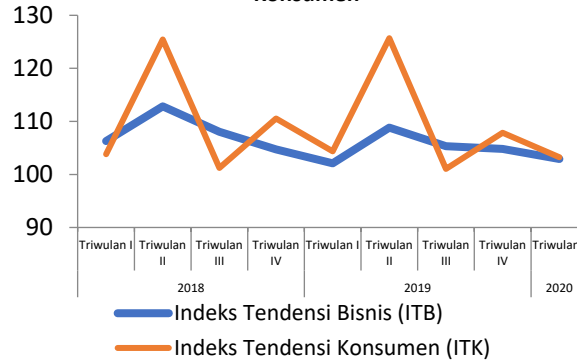
	2020				2019	
	Jan	Feb	Mar	14-Apr	Jan- 14Apr	Jan - Mar
Saham	0.03	-4.76	-5.51	-2.44	-12.67	12.13
SUN	15.2	-28.9	-121.3	-8.6	-143.6	73.9
Total	15.2	-33.7	-126.8	-11.0	-156.3	86.0

PADA AWAL 2020 INDIKATOR KONSUMEN, TENDENSI BISNIS, TENDENSI KONSUMEN, DAN RITEL CENDERUNG BERGERAK MELAMBAT

Survei Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Akan Datang



Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

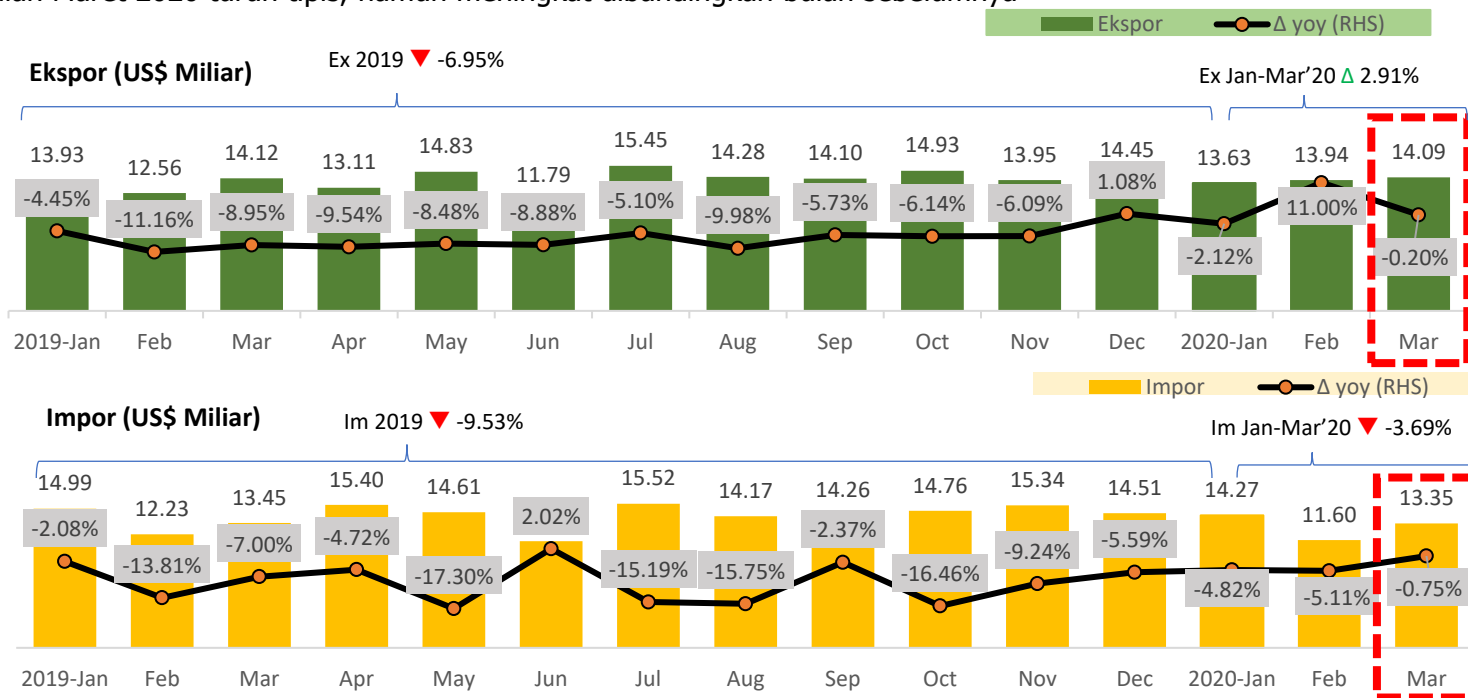


- **Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)** Maret 2020 memberi sinyal optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tidak sekuat bulan sebelumnya. Optimisme Maret sebesar 113,8 lebih rendah dibanding Februari sebesar 117,7.
- Melemahnya optimisme konsumen disebabkan penurunan Indeks Ekonomi Saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK).
 - Penurunan IKE terutama disebabkan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja,
 - Penurunan IEK terutama disebabkan penurunan ekspektasi terhadap ketersediaan tenaga kerja dan penghasilan yang akan diterima pada 6 bulan mendatang.
- Penurunan IKK terdapat terjadi pada responden dengan pengeluaran Rp. 2,1-3 Juta per bulan, sementara secara wilayah penurunan terdapat terjadi di Kota Medan, diikuti Banten, dan Surabaya.

- **Penjualan eceran** Februari 2020 diperkirakan mengalami pelemahan yang semakin dalam dengan tumbuh -1,9% (yoy).
 - Penurunan penjualan diindikasikan terjadi pada sub kelompok komoditas sandang dan peralatan informasi dan komunikasi.
 - Perlambatan penjualan juga terjadi pada kelompok suku cadang dan aksesoris, serta makanan, minuman, dan tembakau.
 - Secara regional kontraksi pertumbuhan penjualan terjadi di Kota Medan, Surabaya, Denpasar, dan Bandung.
- **Indeks Tendensi Bisnis (ITB)** pada Triwulan I 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan sebelumnya, meskipun masih tercatat diatas 100. ITB pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 102,9 lebih rendah dibandingkan bulan triwulan sebelumnya sebesar 104,82
- **Demikian pula dengan Indeks Tendensi Konsumen (ITK)** mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya meskipun masih diatas 100. ITK pada Triwulan I 2020 tercatat pada level 103,23 lebih rendah dari Triwulan sebelumnya sebesar 107,86

KINERJA EKSPOR-IMPOR

Ekspor bulan Maret 2020 turun tipis, namun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya



- Perdagangan global belum pulih benar, seiring berbagai isu global di awal tahun 2020, seperti ketegangan politik AS dan Iran, bencana alam, hingga Covid19;
- Ekspor Maret 2020 turun -0.20 persen (yoy), didorong oleh penurunan ekspor migas namun membaik di beberapa sektor nonmigas lainnya;
- Impor Maret 2020 turun -0.75 persen, seiring pelemahan impor di dua sektor besar impor (Industri pengolahan dan perdagangan).

sumber: BPS dan BC, 15 April 2020



NERACA PERDAGANGAN BULAN MARET 2020 SURPLUS USD0.74M, DIDORONG PENURUNAN IMPOR YANG LEBIH DALAM DIBANDING EKSPOR

Neraca Perdagangan (US\$ Miliar)

Bulan	Migas			Nonmigas			Total (Migas + Nonmigas)		
	Ex	Im	netto	Ex	Im	netto	Ex	Im	netto
2019-Jan	1.23	1.66	-0.42	12.69	13.33	-0.64	13.93	14.99	-1.06
Feb	1.11	1.58	-0.47	11.45	10.64	0.80	12.56	12.23	0.33
Mar	1.14	1.52	-0.38	12.98	11.93	1.05	14.12	13.45	0.67
Apr	0.74	2.24	-1.49	12.37	13.16	-0.79	13.11	15.40	-2.29
Mei	1.14	2.18	-1.05	13.69	12.42	1.26	14.83	14.61	0.22
Jun	0.75	1.71	-0.97	11.05	9.78	1.26	11.79	11.50	0.30
Jul	1.61	1.75	-0.14	13.85	13.77	0.08	15.45	15.52	-0.06
Aug	0.88	1.63	-0.76	13.41	12.54	0.87	14.28	14.17	0.11
Sept	0.83	1.59	-0.76	13.27	12.67	0.60	14.10	14.26	-0.16
Oct	0.92	1.76	-0.84	14.02	13.00	1.01	14.93	14.76	0.17
Nov	1.04	2.13	-1.10	12.91	13.21	-0.30	13.95	15.34	-1.39
Dec	1.13	2.13	-1.00	13.31	12.37	0.94	14.45	14.51	-0.06
Jan-Dec	12.50	21.89	-9.38	154.99	148.84	6.15	167.50	170.73	-3.23
2020-Jan	0.82	1.99	-1.17	12.82	12.28	0.53	13.63	14.27	-0.64
Feb	0.81	1.75	-0.94	13.26	9.80	3.46	14.06	11.55	2.51
Mar	0.67	1.61	-0.93	13.42	11.74	1.68	14.09	13.35	0.74
Apr* (1-15)	0.37	0.45	-0.08	5.30	5.80	-0.50	5.67	6.25	-0.58
Jan-Mar	2.30	5.34	-3.05	39.49	33.83	5.67	41.79	39.17	2.62

sumber: BPS dan BC, 16 April 2020

- NP bulan Maret '20 **surplus** USD0,74 Miliar:
 - Surplus bulan Maret 2020, disebabkan penurunan kinerja impor yang lebih dalam dibandingkan kinerja ekspor;
 - Kinerja ekspor** bulan Maret turun -0,20% (yoy), didorong anjloknya ekspor migas hingga -40,91% (yoy), terutama ekspor gas alam, batubara, dan tembaga. Tumbuhnya ekspor nonmigas 3,38% (yoy), terutama logam mulia, belum mampu mengangkat kinerja ekspor;
 - Kinerja impor** bulan Maret turun lebih dalam dibanding ekspor yaitu -0,75% (yoy), didorong penurunan impor nonmigas sebesar -1.56% (yoy), terutama impor kain rajutan dan barang modal;
 - Peningkatan nilai ekspor-impor dibanding bulan sebelumnya (mtm), disebabkan hari kerja Februari < Maret.
- NP s.d Maret 2020 **surplus USD2.62 Miliar**.
- Update NP 1-15 Apr 2020 defisit -0.58M



Realisasi APBN s.d. 31 Maret 2020

Jakarta, 17 April 2020



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

REALISASI APBN S.D. 31 Maret 2020

Pendapatan Negara Rp375,9 (16,8% APBN; tumbuh 7,7%), Belanja Negara Rp452,4 T (17,8% APBN; tumbuh 0,1%), Defisit Rp76,4 T atau 0,45% PDB

APBN (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165,1	349,0	16,1	4,6	2.233,2	375,9	16,8	7,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164,7	348,9	16,1	4,6	2.232,7	375,9	16,8	7,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,4	278,7	15,6	6,2	1.865,7	279,9	15,0	0,4
a. Pendapatan DJP (<i>Include Pph Migas</i>)	1.577,6	247,7	15,7	1,3	1.642,6	241,6	14,7	(2,5)
b. Pendapatan DJBC	208,8	31,0	14,8	73,1	223,1	38,3	17,2	23,6
2. PNBP	378,3	70,2	18,5	(1,2)	367,0	96,0	26,2	36,8
II. Penerimaan Hibah	0,4	0,1	33,7	(43,7)	0,5	0,1	15,5	(47,4)
B. Belanja Negara	2.461,1	452,1	18,4	7,7	2.540,4	452,4	17,8	0,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,3	260,7	16,0	11,4	1.683,5	277,9	16,5	6,6
1. Belanja K/L	855,4	128,8	15,1	24,8	909,6	143,0	15,7	11,0
2. Belanja Non K/L	778,9	132,0	16,9	0,9	773,9	134,9	17,4	2,2
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826,8	191,3	23,1	3,1	856,9	174,5	20,4	(8,8)
1. Transfer Ke Daerah	756,8	181,2	23,9	3,4	784,9	167,3	21,3	(7,7)
2. Dana Desa	70,0	10,1	14,4	(1,9)	72,0	7,2	10,0	(28,6)
C. Keseimbangan Primer	(20,1)	(32,5)	161,5	87,1	(12,0)	(2,6)	21,6	(92,0)
D. Defisit	(296,0)	(103,1)	34,8	20,1	(307,2)	(76,4)	24,9	(25,8)
% Defisit thd PDB	(1,84)	(0,65)			(1,76)	(0,45)		
E. Pembiayaan Anggaran	296,0	177,9	60,1	16,9	307,2	74,2	24,2	(58,3)

Realisasi Penerimaan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan pajak akan menghadapi tekanan berat pada bulan-bulan selanjutnya karena adanya perlambatan aktifitas ekonomi, pemberian stimulus dan fasilitas, serta penurunan harga komoditas.

Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.577,6	247,7	15,7	1,3	1.642,6	241,6	14,7	(2,5)
1. PPh Migas	66,2	14,5	21,9	26,5	57,4	10,3	18,0	(28,6)
2. Pajak Nonmigas	1.511,4	233,2	15,4	0,1	1.585,1	231,3	14,6	(0,8)
a. PPh Nonmigas	828,3	141,8	17,1	6,7	872,5	137,5	15,8	(3,0)
b. PPN	655,4	89,8	13,7	(9,1)	685,9	92,0	13,4	2,5
c. PBB	19,1	0,3	1,4	(359,6)	18,9	0,4	1,9	38,3
d. Pajak Lainnya	8,6	1,4	16,8	(12,4)	7,9	1,5	18,4	0,9
B. Kepabeanan dan Cukai	208,8	31,0	14,8	73,1	223,1	38,3	17,2	23,6
1. Cukai	165,5	21,3	12,9	165,1	180,5	29,1	16,1	36,5
2. Pajak Perdagangan Internasional	43,3	9,6	22,2	(2,2)	42,6	9,1	21,5	(5,0)
a. Bea Masuk	38,9	8,5	22,0	1,6	40,0	8,4	21,0	(1,5)
b. Bea Keluar	4,4	1,1	24,3	(24,8)	2,6	0,7	27,9	(32,6)
JUMLAH	1.786,4	278,7	15,6	6,2	1.865,7	279,9	15,0	0,4

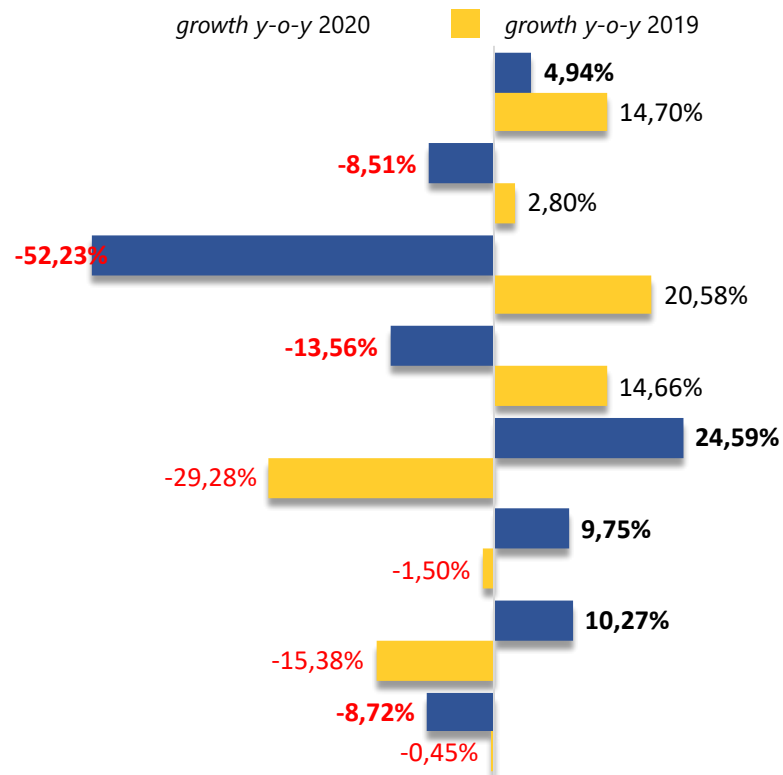
PENERIMAAN PAJAK MARET 2020

1. Penerimaan pajak bulan Maret 2020 sebesar Rp88,69 triliun, **tumbuh 2,18%** dibanding penerimaan bulan Maret 2019 sebesar Rp 86,80 triliun.
2. Pertumbuhan penerimaan bulan Maret 2020 **ditopang oleh pertumbuhan PPh Pasal 26** sebesar 62,95%, **pertumbuhan PPN Dalam Negeri** sebesar 8,35%, **pertumbuhan PPh Final** sebesar 6,69% dan **pertumbuhan PPh Pasal 21** sebesar 3,80%.
3. Untuk PPh Pasal 21, setelah tumbuh 13,50% di bulan Februari, penerimaan bulan Maret tumbuh 3,80%, disebabkan **perlambatan pembayaran Angsuran/Masa** yang hanya tumbuh 4,11%. Bersamaan dengan ini, pembayaran PPh Pasal 21 atas JHT/IUP/Pensiun mengalami pertumbuhan 10,12%, yang tertinggi selama triwulan I, mengindikasikan **penurunan jumlah tenaga kerja**.
4. Seiring dengan wabah pandemic Covid 19, untuk Maret 2020, DJP memberikan **relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP** yang seharusnya dibayar maksimal tanggal 25 Maret 2020 dan **pelaporan SPT PPh OP**, yang seharusnya disampaikan maksimal tanggal 31 Maret 2020, keduanya diberi kelonggaran penyampaian sampai dengan 30 April 2020. Hal ini **berimbas pada penurunan penerimaan** PPh Pasal 29 OP, yang pada bulan Maret 2019 terhimpun sebesar Rp 5,21 triliun, pada bulan Maret 2020 ini hanya terhimpun sebesar Rp 1,72 triliun.
5. Untuk PPh Badan, **bulan Maret ini sudah mulai menunjukkan pelambatan**, bahkan tumbuh negatif. Pembayaran PPh Pasal 25 Badan, yang merupakan kontributor terbesar, tumbuh -2,10%. Pelambatan diproyeksikan masih akan berlanjut, seiring melemahnya perekonomian dan penurunan harga komoditas.
6. Untuk PPN DN, penerimaan bulan Maret 2020 **masih mampu tumbuh 8,35%** ditopang oleh masih cukup bagusnya penyerahan di bulan Februari 2020 (transaksi di bulan Februari dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Maret 2020). Diperkirakan pada bulan-bulan berikutnya akan melemah seiring kebijakan PSBB di beberapa daerah.
7. Dengan diterapkannya PSBB yang mengakibatkan pembatasan aktivitas ekonomi dan juga diberlakukannya berbagai paket stimulus pajak per April, **kinerja penerimaan pajak ke depannya akan mengalami tekanan yang cukup berat**.

PENERIMAAN PER JENIS PAJAK

Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya

PPh 21	Rp	36,58 T
		15,14 %
PPh 22 Impor	Rp	12,31 T
		5,09 %
PPh OP	Rp	3,08 T
		1,28 %
PPh Badan	Rp	34,54 T
		14,30 %
PPh 26	Rp	8,68 T
		3,59 %
PPh Final	Rp	28,49 T
		11,79 %
PPN DN	Rp	51,63 T
		21,37 %
PPN Impor	Rp	37,00 T
		15,32 %



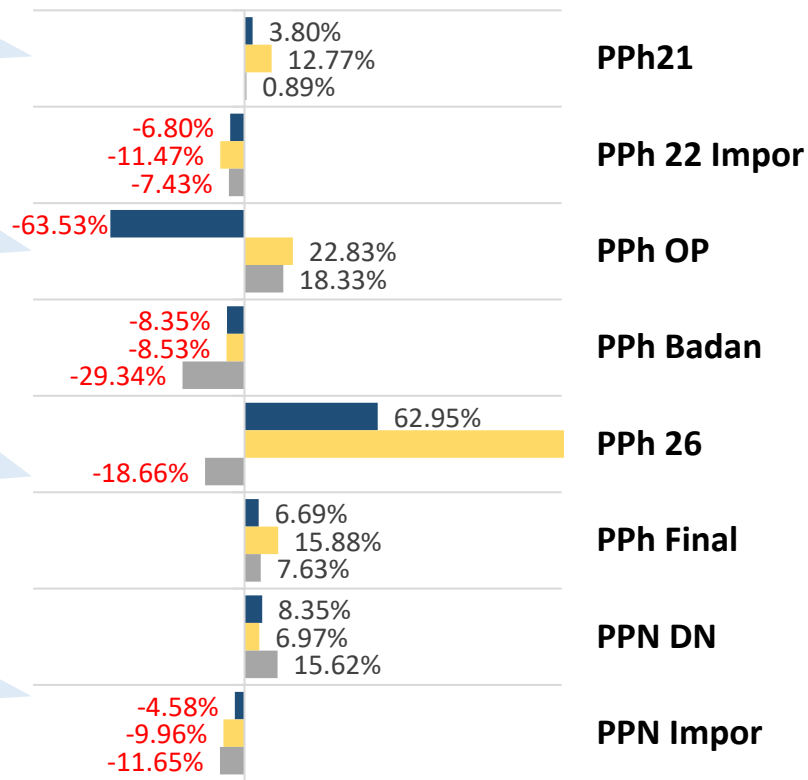
PENERIMAAN PER JENIS PAJAK PER BULAN

Kinerja PPh Pasal 21 kembali melambat di bulan Maret.
Setoran Masa melambat dan JHT/IUP/Pensiun mengalami pertumbuhan 10,12% di Maret, (tertinggi Q1).

Jumlah pembayaran PPh OP tumbuh negative di Maret → PPh Pasal 29 Tahunan tumbuh **minus 66,98%** akibat relaksasi pembayaran PPh Tahunan OP dan pelaporan SPT Tahunan OP menjadi 30 April 2020.

Perlambatan PPh Badan karena perlambatan ekonomi global dan domestik di 2019.
Pertumbuhan bulan Maret membaik karena pembayaran Angsuran PPh 25 Masa tumbuh 2,15%.

Kontraksi PPh/PPN Impor karena kontraksi kegiatan impor di Q1 tumbuh **minus 3,69%**.
Kontraksi di bulan Maret hanya 0,75% tidak sedalam di bulan sebelumnya



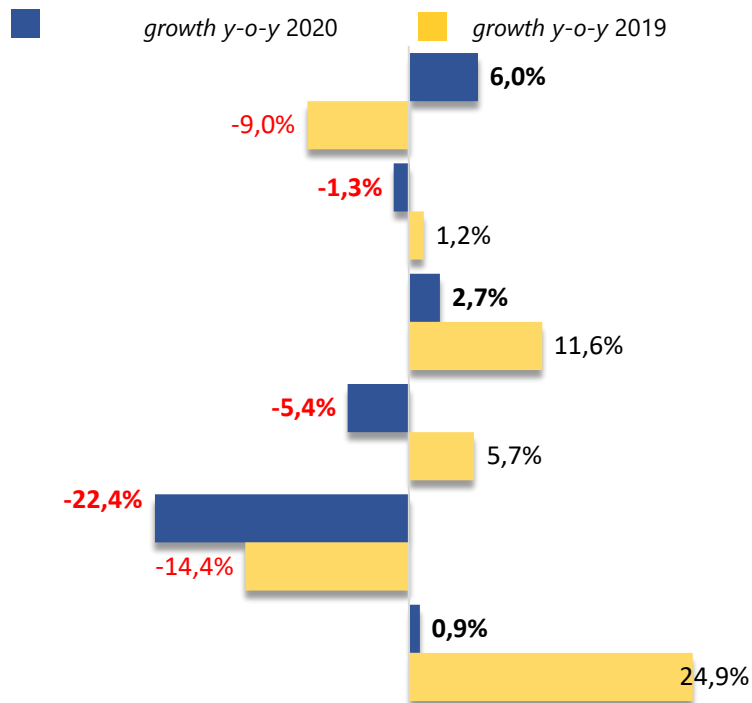
■ Mar ■ Feb ■ Jan

PENERIMAAN PER SEKTOR USAHA (NETO)

Sektor industri pengolahan tumbuh sangat baik, namun sektor-sektor utama lainnya cenderung tertekan

Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya

Industri Pengolahan	Rp	64,06	T
		27,5	%
Perdagangan	Rp	52,76	T
		22,7	%
Jasa Keuangan & Asuransi	Rp	33,33	T
		14,3	%
Konstruksi & Real Estat	Rp	16,02	T
		6,9	%
Pertambangan	Rp	7,98	T
		3,4	%
Transportasi & Pergudangan	Rp	11,96	T
		5,1	%



*penerimaan pajak sektoral
non migas, non PBB, dan non PPh DTP

REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan kepabeanan dan cukai masih mampu tumbuh 23,6% (yoy) di bulan Maret 2020, namun akan mengalami tekanan pada bulan-bulan selanjutnya karena adanya pembebasan dan relaksasi aturan.

dalam triliun rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian APBN	Target PP 54	% Capaian
			2019	2020	2019	2020			
1	BEA MASUK	40.00	8.55	8.41	1.59	-1.55	21.04	33.88	24.84
2	CUKAI	180.53	21.35	29.14	165.12	36.50	16.14	172.90	16.85
	Hasil Tembakau	173.15	20.11	27.73	189.14	37.87	16.01	165.65	16.74
	Ethil Alkohol	0.15	0.03	0.08	-16.51	182.86	54.84	0.15	54.84
	MMEA	7.13	1.18	1.30	13.26	10.20	18.26	7.10	18.34
	Denda Adm. Cukai	-	0.01	0.01	23.80	9.03	-		
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	52.49	-23.27	-		
	Plastik	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	BEA KELUAR	2.60	1.08	0.73	-24.76	-32.56	27.92	1.75	41.49
	TOTAL	223.13	30.97	38.28	73.06	23.60	17.15	208.52	18.36
	PPN Impor		40.54	37.00	-0.45	-8.72			
	PPn BM Impor		0.82	1.08	-13.80	30.73			
	PPH Pasal 22 Impor		13.45	12.31	2.80	-8.51			
	Total PDRI lainnya		54.82	50.39	0.09	-8.08			
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		85.79	88.67	18.06	3.36			



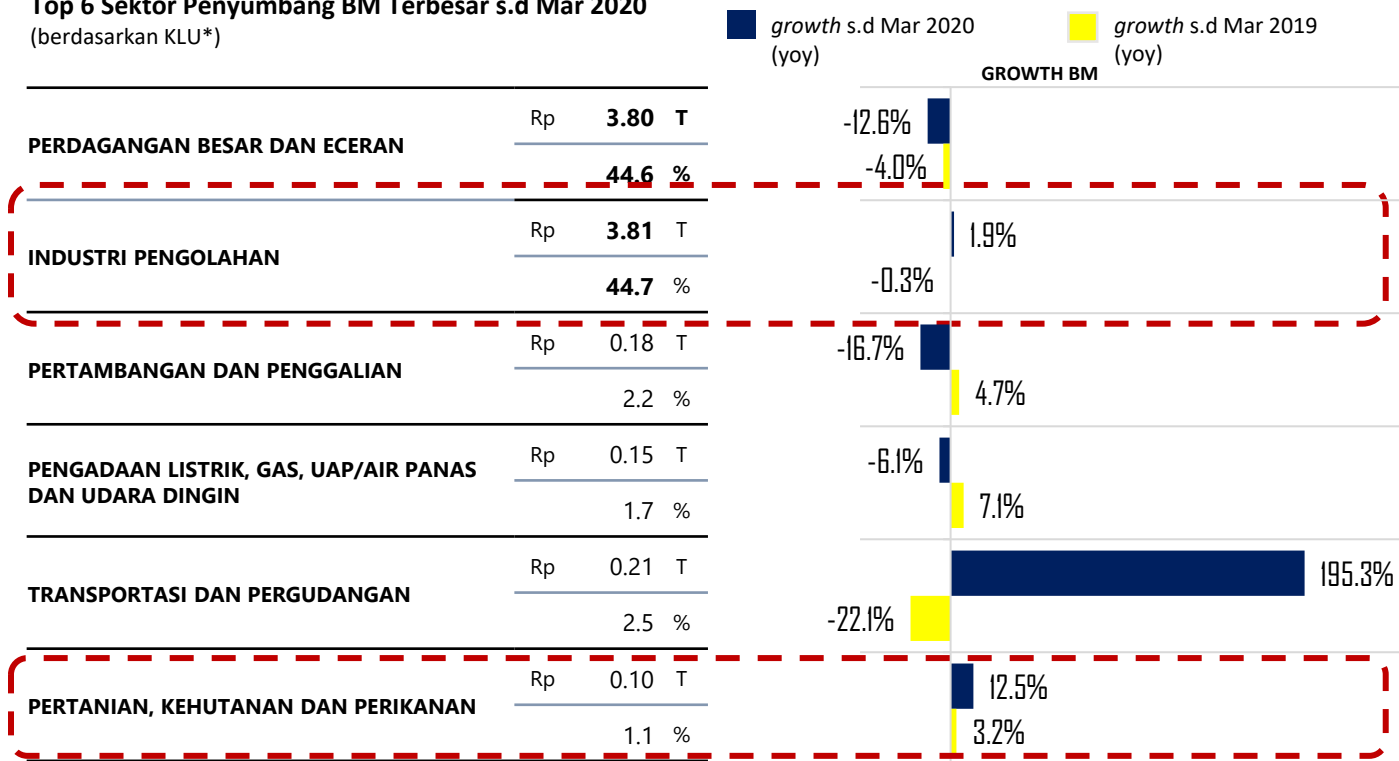
- Realisasi penerimaan DJBC Rp **38.28 T** (**17.15%** Target APBN & **18,36%** target PP 54 2020)
- Penerimaan tumbuh sebesar **▲ 23.60%**
- Pertumbuhan didorong oleh penerimaan **Cukai (▲ 36,50%)**

KINERJA BEA MASUK PER KATEGORI LAPANGAN USAHA (KLU)

Ada peningkatan kinerja BM terjadi di Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian

Top 6 Sektor Penyumbang BM Terbesar s.d Mar 2020

(berdasarkan KLU*)



- BM Sektor Industri Pengolahan tumbuh karena adanya Impor Pertamina, terutama Gas Alam;
- Peningkatan BM Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, disebabkan adanya impor gula

*Keterangan:

1. Sumber: BC, 2 April 2020

2. Pembagian sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP pelunasan billing

3. Kategori Perdagangan besar dan eceran termasuk : Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Brg Keperluan Pribadi & Rumah Tangga

KINERJA BEA KELUAR PER KATEGORI LAPANGAN USAHA (KLU)

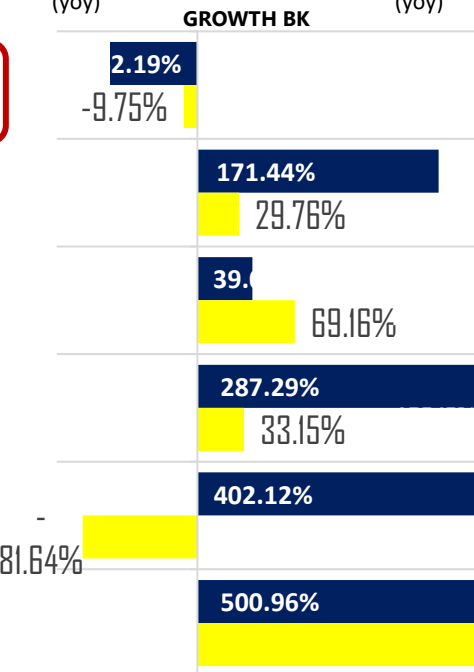
Lapangan Usaha Pertambangan Masih Melambat, Namun Industri Pengolahan Tumbuh Signifikan

Top 6 Sektor Penyumbang BK Terbesar Jan-Mar 2020

(berdasarkan KLU*)

PERTAMBANGAN	Rp	353.9 M
		49.1 %
INDUSTRI PENGOLAHAN	Rp	225.8 M
		31.3 %
PERDAGANGAN BESAR & ECERAN	Rp	94.7 M
		13.1 %
PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	Rp	44.7 M
		6.2 %
TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	Rp	1.5 M
		0.2 %
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS & UDARA DINGIN	Rp	58.6 JT
		0.01 %

■ growth s.d Mar 2020 (yoy) ■ growth s.d Mar 2019 (yoy)



- Sektor Pertambangan terdampak turunnya produksi tembaga, dan adanya larangan ekspor nikel;
- Sektor Industri Pengolahan tumbuh signifikan, didorong peningkatan ekspor produk kelapa sawit (harga CPO>750 \$/MT);
- Sektor Perdagangan Besar masih tumbuh, seiring peningkatan perdagangan cangkang sawit;
- Peningkatan Sektor Pertanian, Transportasi, dan Pengadaan Energi, didorong peningkatan ekspor komoditas olahan kayu terutama ke India, Jepang, dan Tiongkok.

*Keterangan:

1. Sumber: BC, 1 April

2. Pembagian sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP pelunasan billing

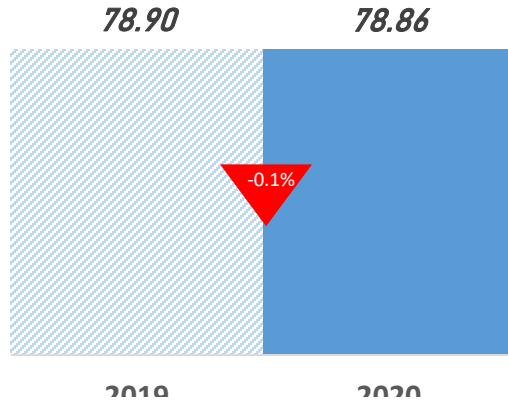
3. Kategori Perdagangan besar dan eceran termasuk : Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Brg Keperluan Pribadi & Rumah Tangga



KINERJA CUKAI HASIL TEMBAKAU

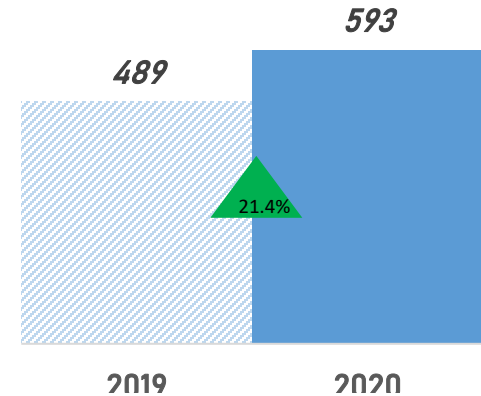
Penurunan produksi HT yang membaik dibanding periode sampai dengan Februari

Kinerja Produksi HT (CK-1) (Miliar Batang)



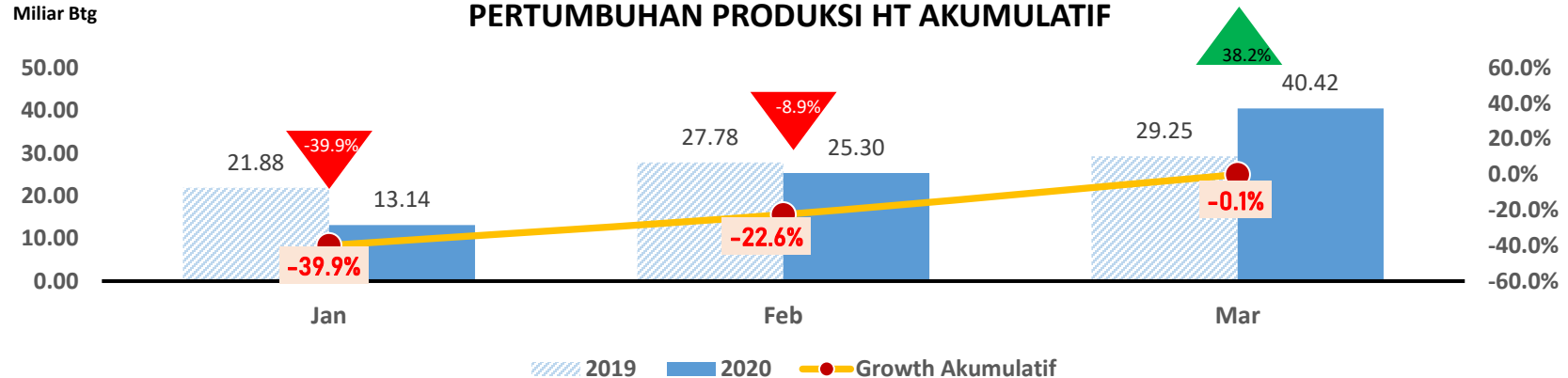
- Produksi HT turun sebesar -0.1 persen;
- Penurunan ini membaik dibanding periode s.d Feb sebelumnya sebesar -22.6%;
- Tarif tertimbang efektif naik 21.4% persen → lebih rendah dibanding kenaikan tarif normatif yang 23 persen;
- Hal ini disebabkan produksi HT yang masih mengalami penurunan, sehingga kenaikan tarif belum terserap sepenuhnya.

Kenaikan Tarif Tertimbang Efektif (Rp/Btg)



Miliar Btg

PERTUMBUHAN PRODUKSI HT AKUMULATIF



STIMULUS EKONOMI DALAM MENGHADAPI DAMPAK VIRUS CORONA

Insentif fiskal & prosedural guna mengembalikan penurunan kinerja perekonomian akibat dampak virus corona

PEMBEBASAN CUKAI ALKOHOL Untuk PENANGANAN COVID-19



- Perluasan bebas Cukai Etil Alkohol untuk produksi hand sanitizer kepada RS, Universitas dll

SE-04/BC2020

1

RELAKSASI PPh IMPOR untuk PERUSAHAAN KITE



- Pembebasan PPh ps 22 Impor
- Pengurangan PPh ps 25 Impor sebesar 30%
- Berlaku 6 bln

PMK-23/2020

3

RELAKSASI PELUNASAN CUKAI & PRODUKSI ROKOK



- Tunda lunasi cukai dari 60 → 90 hari
- Ijin produksi di luar pabrik

- PMK-30/2020

5

PERCEPATAN LOGISTIK dengan SISTEM NLE



Sistem kolaborasi logistic impor :

- Shipping
- Port Clearance
- Warehousing
- Trucking dll

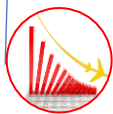
Layanan DO Online

KEP-122/2020
(TIM NLE)

7

2

SE-07/BC2020



- Simplifikasi penyerahan dokumen FTA online

RELAKSASI FASILITAS IMPOR
(DOK FTA ONLINE)

4

- PMK-171/2019
- PMK-70/2012
- SKB DJBC-BNPB



LAYANAN ONLINE
(via INSW & DJBC) :

- Rekomendasi/Ijin BNPB
- Pembebasan BM & PDRI

PERCEPATAN LAYANAN ONLINE
UNTUK PENANGANAN COVID-19

6

PMK-31/2020



- Relaksasi jual lokal produk ALKES dr KB & KITE

RELAKSASI PENJUALAN LOKAL
dari perusahaan KB/KITE

REALISASI PNBP

Tantangan penerimaan PNBP cukup berat pada bulan-bulan berikutnya karena harga minyak masih rendah dan tidak adanya setoran laba BUMN yang signifikan.

PNBP

(miliar Rupiah)

	2019				2020			
	LKPP Unaudited	Real s.d 31 Maret	% thd LKPP Unaudited	yoy	APBN	Real s.d 31 Maret	% thd APBN	yoy
Penerimaan Negara Bukan Pajak	407.117,4	70.163,7	17,23	(1,24)	366.995,1	95.985,4	26,15	36,80
A Penerimaan SDA	154.219,6	34.896,8	22,63	(3,05)	160.358,3	35.030,3	21,85	0,38
1 Migas	120.414,2	26.662,7	22,14	(4,35)	127.313,2	28.641,8	22,50	7,42
a Minyak Bumi	88.738,7	26.646,3	30,03	(4,41)	96.807,7	28.641,8	29,59	7,49
b Gas Bumi	31.675,5	16,4	0,05	746.171,49	30.505,5	0,0	0,00	(100,00)
2 Non Migas	33.805,4	8.234,1	24,36	1,42	33.045,0	6.388,5	19,33	(22,41)
a Pertambangan Minerba	26.343,7	7.049,5	26,76	0,76	26.209,1	5.348,7	20,41	(24,13)
b Kehutanan	5.007,3	823,4	16,44	8,01	4.738,9	654,4	13,81	(20,53)
c Perikanan	521,9	167,7	32,14	20,53	900,4	161,6	17,95	(3,65)
d Pend. Pert. Panas Bumi	1.932,5	193,5	10,02	(12,21)	1.196,7	223,8	18,70	15,63
B Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80.726,1	2,6	0,00	-	49.000,0	23.975,6	48,93	907.314,82
C PNBP Lainnya	123.310,6	25.882,3	20,99	4,06	100.945,3	24.110,1	23,88	(6,85)
D Pendapatan BLU	48.861,1	9.382,0	19,20	(7,51)	56.691,6	12.869,4	22,70	37,17

1. Penerimaan Sumber Daya Alam:

- Pertumbuhan SDA Migas disebabkan kenaikan rata-rata ICP dan depresiasi nilai tukar Rupiah thd Dollar.
- Windfall kenaikan PNBP SDA Migas sulit dipertahankan karena ICP Maret 2020 anjlok menjadi US\$34,23 per barel.
- Pertumbuhan negative SDA Nonmigas - 22,41% (yoy) akibat penurunan HBA dan volume penjualan.

2. Pendapatan dari KND tumbuh 907.314,82% (yoy) disebabkan setoran laba beberapa BUMN yang dibayarkan di bulan Maret

3. Kenaikan pendapatan BLU disebabkan peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan peningkatan layanan kesehatan Rumah Sakit Pemerintah, serta pendapatan jasa layanan pendidikan.

Realisasi Belanja



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

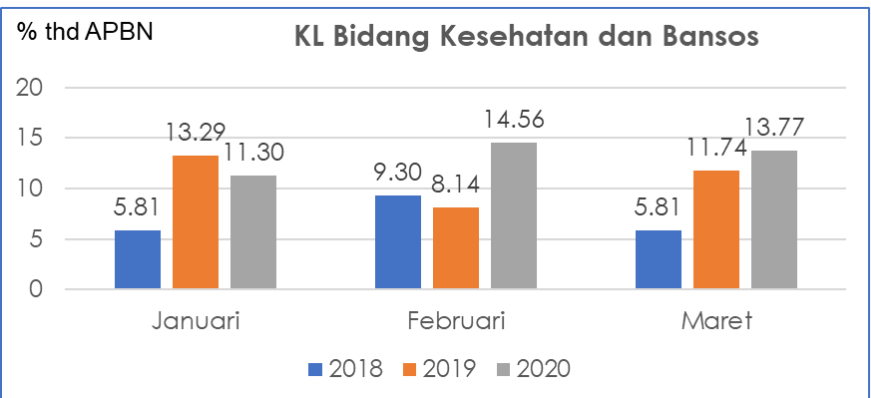
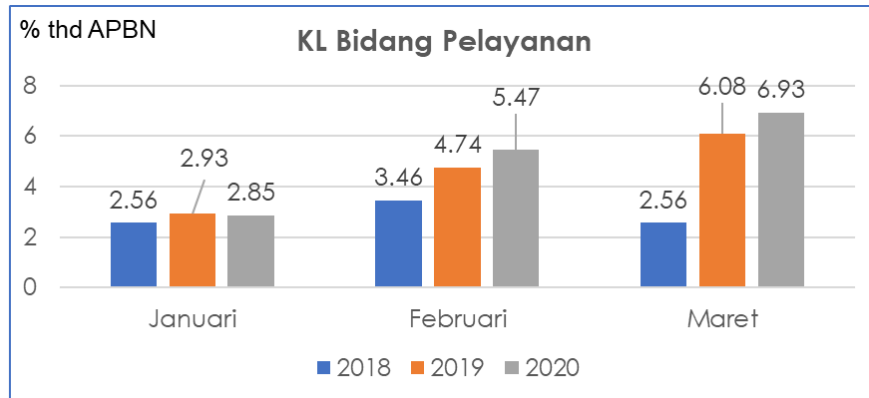
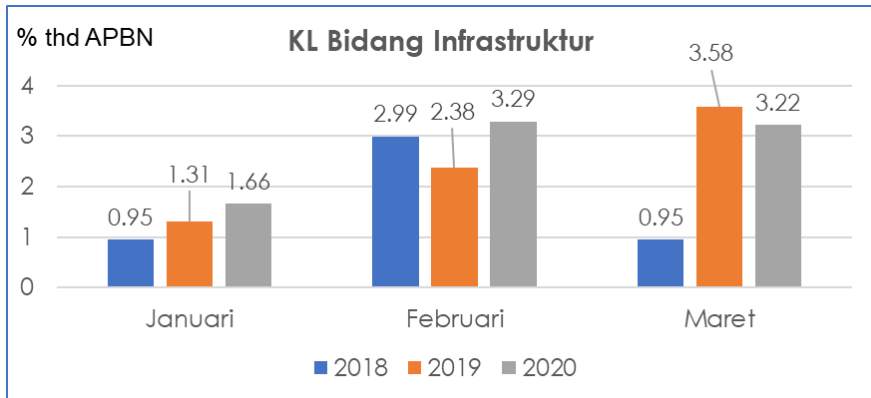
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja Pemerintah Pusat direalokasi dan difokuskan untuk penanganan wabah COVID-19

Belanja Pemerintah Pusat (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
1. Belanja K/L	855,4	128,8	15,1	24,8	909,6	143,0	15,7	11,0
a. Belanja Pegawai	224,4	45,1	20,1	11,6	261,2	48,6	18,6	8,0
b. Belanja Barang	344,6	37,7	10,9	7,2	335,9	35,2	10,5	(6,6)
c. Belanja Modal	189,3	9,1	4,8	(6,7)	209,5	12,0	5,7	32,1
d. Belanja Bantuan Sosial	97,1	37,0	38,1	106,6	103,0	47,2	45,8	27,6
2. Belanja Non K/L	778,9	132,0	16,9	0,9	773,9	134,9	17,4	2,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	275,9	70,6	25,6	3,1	295,2	73,8	25,0	4,6
b. Subsidi	224,3	21,8	9,7	(13,7)	187,6	18,7	10,0	(14,3)
c. Belanja Hibah	1,9	0,0	0,1	-	2,2	0,0	0,0	(97,6)
JUMLAH	1.634,3	260,7	16,0	11,4	1.683,5	277,9	16,5	6,6

PENYERAPAN BELANJA PADA 10 K/L TERBESAR 2020 S.D. 31 MARET BERDASARKAN BIDANG

Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial menjadi yang terbesar berdasarkan tingkat penyerapan. Secara umum, tingkat penyerapan tahun 2020 lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2018 dan 2019.



BIDANG INFRASTRUKTUR (Kemen PUPR dan Kemenhub)

- Penyerapan di bulan Maret cenderung melambat dibanding bulan sebelumnya.

BIDANG PELAYANAN (Kemenhan, POLRI, Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemenag)

- Kinerja belanja pelayanan terus meningkat

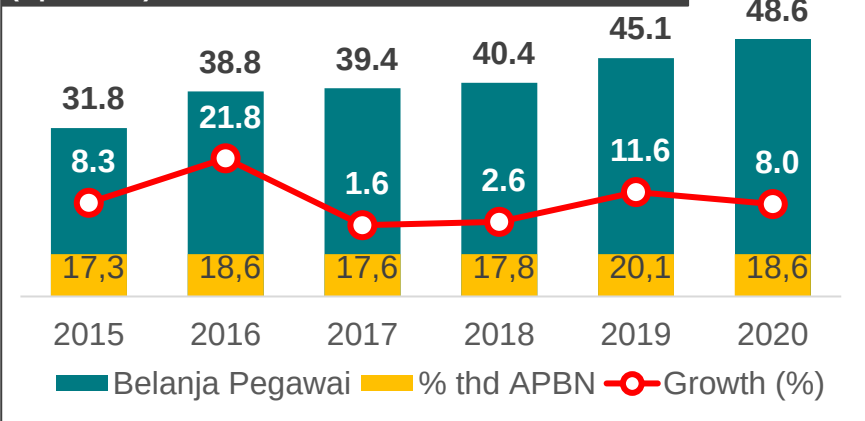
BIDANG KESEHATAN DAN BANTUAN SOSIAL (Kemenkes, Kemensos, dan BNPB)

- Penyerapan dipercepat sejak awal tahun, terutama pada bulan Februari dan Maret
- Di bulan Februari 2020 terdapat pencairan PBI JKN bulan Februari dan pencairan dimuka bulan Maret dan April

REALISASI BELANJA PEGAWAI K/L

Mencapai Rp 48,6 Triliun, 18,6 % dari pagunya dan tumbuh 8,0 % dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pegawai K/L s.d. 31 Mar, 2015-2020
(Rp Triliun)



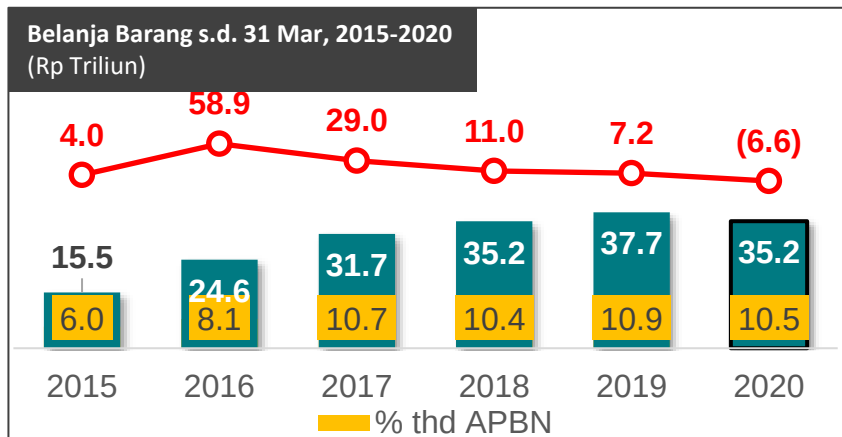
Belanja Pegawai (Rp Triliun)	2019			2020		
	APBN	Real s.d. 31 Mar	% APBN	APBN	Real s.d. 31 Mar	% APBN
Polri	43,20	10,10	23,4%	53,74	10,08	18,8%
Kementerian Pertahanan	41,65	9,64	23,1%	53,01	10,06	19,0%
Kementerian Agama	36,17	4,75	13,1%	39,20	5,32	13,6%
Kementerian Keuangan	21,24	5,33	25,1%	22,91	6,80	29,7%
Mahkamah Agung	6,27	1,37	21,8%	7,08	1,38	19,5%
K/L Lainnya	75,88	13,87	18,3%	85,28	14,99	17,6%
Total	224,42	45,06	20,1%	261,22	48,64	18,6%

Uraian	2019			2020			Keterangan
	APBN	Real s.d 31 Mar	% Thd APBN	APBN	Real s.d 31 Mar	% Thd APBN	
Belanja Pegawai KL	224,4	45,1	20,1	261,2	48,6	18,6	
1 Gaji dan Tunjangan	155,7	29,5	19,0	167,0	31,9	19,1	antara lain untuk pembayaran gaji, uang makan, tunjangan beras
2 Honorarium, Vakasi, dll	68,7	15,5	22,6	94,2	16,7	17,8	antara lain untuk pembayaran honorarium dan tunjangan kinerja

- Realisasi Belanja Pegawai K/L s.d. 31 Maret tumbuh 8,0 persen dibanding tahun 2019, antara lain disebabkan:
 - kenaikan alamiah (kenaikan pangkat & golongan)
 - kebijakan kenaikan Gaji Pokok tahun 2019 yang telah menjadi *baseline* di tahun 2020.
 - Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Tenaga Pendidik Non-PNS pada Kemenag.
 - Pembayaran TPG Non PNS untuk Guru TK/TLB, Guru Dikdas, dan Guru Dikmen Kemendikbud.
- Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai (yoy) terjadi pada beberapa K/L dengan pagu terbesar diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan.

REALISASI BELANJA BARANG

Tumbuh negatif 6,6%, dipengaruhi perlambatan realisasi pada bulan Maret 2020



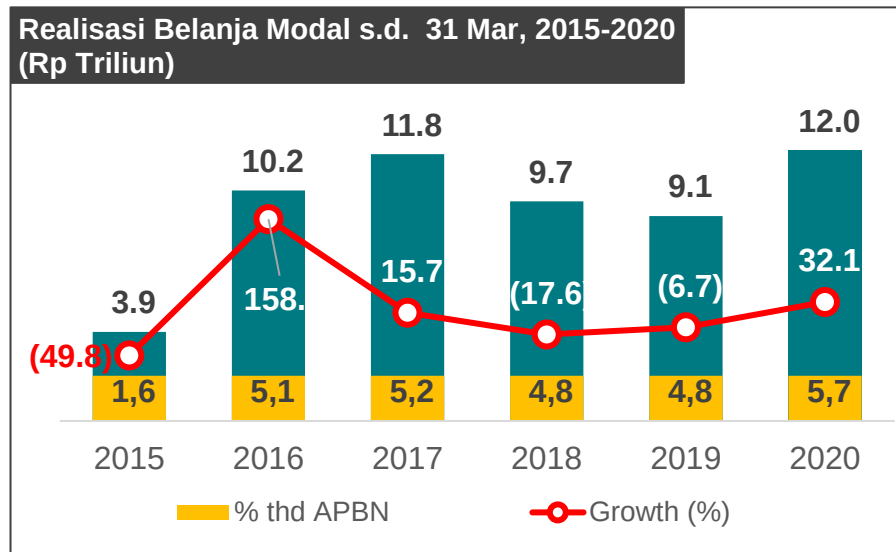
Belanja Barang (Rp Triliun)	2019			2020		
	APBN	Real s.d Mar	%thd APBN	APBN	Real s.d Mar	%thd APBN
Barang	134,4	19,4	14,4	126,9	17,5	13,8
Jasa	34,6	3,8	11,1	34,0	4,0	11,7
Pemeliharaan	36,7	2,8	7,5	43,1	3,5	8,2
Perjalanan	45,4	6,5	14,4	43,7	4,9	11,1
B L U	41,7	4,3	10,3	39,6	4,3	10,8
Utk Masy/Pemda	51,9	0,8	1,6	48,6	1,0	2,1
Jumlah	344,6	37,7	10,9	335,9	35,2	10,5

Belanja Barang (Rp Triliun)	2019			2020		
	APBN	Real s.d Mar	%thd APBN	APBN	Real s.d Mar	%thd APBN
Kemenhan	34,6	2,6	7,4	42,3	3,6	8,6
Polri	25,3	4,5	17,9	28,2	4,1	14,7
Kemenkes	23,4	3,0	12,7	22,7	2,4	10,5
Kemenag	19,1	4,3	22,5	19,2	4,9	25,4
Kemenkeu	22,1	1,8	8,2	17,9	2,1	11,7
Kemenhub	14,2	1,4	9,9	16,6	1,9	11,6
Lainnya	205,9	20,1	9,7	189,0	16,1	8,5
Jumlah	344,6	37,7	10,9	335,9	35,2	10,5

- ❑ Belanja barang tumbuh negatif, utamanya untuk belanja barang perjalanan, operasional lainnya, dan honor kegiatan
- ❑ Beberapa K/L mengalami peningkatan belanja barang, al:
 - Kemenhan → Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (pengadaan peralatan pelayanan kesehatan yg selanjutnya diserahkan ke Rumkit TNI)
 - Kemenag → Pemberian BOS utk siswa/i MI, MTs, dan MA serta pemberian BOP RA
 - Kemenkeu → BLU LPDP dan BLU Kelapa Sawit
 - Kemenhub → Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api dan kegiatan dukungan manajemen

REALISASI BELANJA MODAL

Tumbuh 32,1 % dari 2019, a.l. didorong peningkatan realisasi belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan, serta Peralatan dan Mesin



Realisasi Belanja Modal K/L (Rp Triliun)	2019			2020		
	APBN	Real s.d Maret	% thd APBN	APBN	Real s.d Maret	% thd APBN
KEMEN PUPR	75,7	6,3	8,3	82,8	7,2	8,8
Kementerian Pertahanan	32,1	0,4	1,3	35,9	1,1	3,1
Kepolisian Negara Republik Indonesia	17,7	0,2	1,1	22,6	0,7	3,2
Kementerian Perhubungan	23,9	0,7	2,7	22,4	1,1	4,8
Kementerian Agama	4,8	0,2	4,2	4,6	0,7	14,4
K/L Lainnya	35,1	1,3	3,7	41,2	1,1	2,8
Jumlah	189,3	9,0	4,8	209,5	12,0	5,7

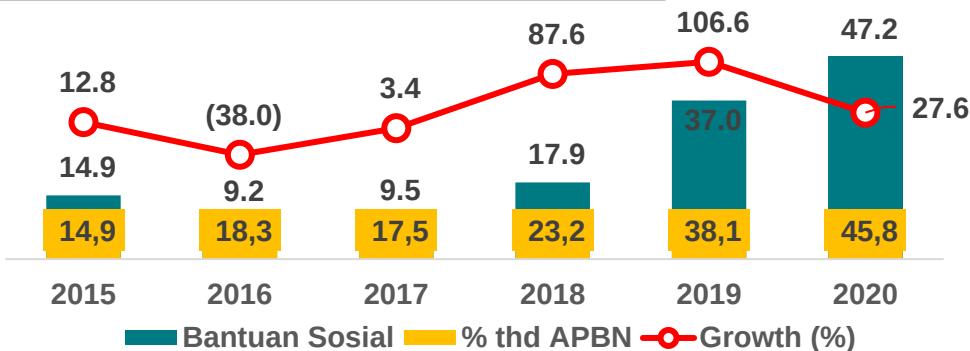
Realisasi Belanja Modal Per Akun (Rp Triliun)	2019			2020		
	APBN	Real s.d Maret	% thd APBN	APBN	Real s.d Maret	% thd APBN
Modal Tanah	3,6	0,2	4,8	5,2	0,6	12,2
Peralatan dan Mesin	60,7	0,9	1,4	70,9	2,0	2,9
Gedung dan Bangunan	31,6	0,7	2,3	33,2	1,6	4,7
Jalan, irigasi, dan Jaringan	83,1	6,5	7,8	88,8	7,3	8,2
Lainnya	6,6	0,7	10,2	8,2	0,4	4,8
Badan Layanan Umum (BLU)	3,8	0,1	2,9	3,3	0,1	1,5
Jumlah	189,4	9,0	4,8	209,6	12,0	5,7

1. Realisasi belanja modal tumbuh 32,1 % dari tahun 2019 → belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Peralatan dan Mesin
2. Realisasi beberapa proyek belanja modal:
 - Kemen PUPR a.l kegiatan: Pembangunan Bendungan Rp824,9 M (Bulango Ulu–Gorontalo Rp132,4 M, Manikin-Kupang Rp168,0 M, Semantok - Jatim Rp80,4 M), Jalan/Jembatan Rp444,1 M
 - Kemenhub a.l kegiatan: jalur KA, pengadaan kapal, dsb
3. realisasi belanja peralatan dan mesin → alutsista TNI dan peralatan Polri:
 - Kemenhan a.l kegiatan Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan dan Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut
 - POLRI a.l kegiatan Pengembangan Peralatan Polri

REALISASI BELANJA BANSOS K/L

Tumbuh 27,6%, antara lain dipengaruhi oleh pencairan beberapa komponen Bansos seperti PBI JKN dan Bantuan Pangan

Realisasi Bansos s.d. 31 Mar, 2015-2020 (Rp Triliun)



Belanja Bantuan Sosial (Rp Triliun)	2019			2020		
	APBN	Real s.d. Maret	% thd APBN	APBN	Real s.d. Maret	% thd APBN
023 KEMENDIKBUD	9,7	0,4	4,0	9,7	3,1	32,5
024 KEMENKES	26,7	10,7	40,2	26,7	20,2	75,5
025 KEMENAG	1,9	0,1	3,6	2,0	0,1	5,5
027 KEMENSOS	54,3	23,8	43,8	58,2	23,8	40,8
042 KEMENRISTEK / BR&IN	4,4	2,0	44,9	6,1	-	-
103 BNPB	0,0	-	-	0,3	-	-
JUMLAH	97,1	37,0	38,1	103,0	47,2	45,8

Realisasi Bansos s.d. Maret 2020 **tumbuh 27,6 persen** karena :

- Bantuan Iuran PBI JKN - Kemenkes
 - Kenaikan tariff 2020 dan penarikan iuran PBI s.d. bulan Mei
- Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako - Kemensos
 - Kenaikan indeks Bantuan Pangan dari Rp110.000/KPM/Bulan (2019) menjadi Rp200.000/KPM/Bulan (per Maret 2020); dan
 - Perbaikan mekanisme penyaluran Bantuan melalui non tunai secara menyeluruh yang meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan dan membantu kemudahan administrasi

Uraian (Triliun Rupiah)	2019			2020		
	APBN	Real s.d. Mar	% thd Pagu	APBN	Real s.d. Mar	% thd Pagu
Belanja Bansos Untuk Rehabilitasi Sosial	0,4	0,0	0,1	0,3	0,0	3,0
Belanja Bansos Untuk Jaminan Sosial (a.l. PBI JKN)	38,1	12,7	33,4	36,3	23,0	63,4
Belanja Bansos Untuk Pemberdayaan Sosial	2,8	0,4	13,8	2,4	0,3	11,1
Belanja Bansos Untuk Perlindungan Sosial (a.l. PKH)	34,6	19,5	56,2	33,9	14,1	41,8
Belanja Bansos Untuk Penanggulangan Kemiskinan (a.l. Kartu Sembako)	21,0	4,4	20,9	16,1	9,7	60,3
Belanja Bansos Untuk Penanggulangan Bencana	0,1	0,0	0,9	2,7	0,0	0,0
TOTAL	97,1	37,0	38,1	91,7	47,2	51,4



Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Realisasi TKDD di bulan-bulan berikutnya diharapkan dapat dipercepat sejalan dengan perubahan mekanisme penyaluran serta refocusing dan realokasi penyaluran

TKDD (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
1. Transfer ke Daerah	756,8	181,2	23,9	3,4	784,9	167,3	21,3	(7,7)
a. Dana Perimbangan	724,6	176,1	24,3	3,5	747,2	167,1	22,4	(5,1)
- Dana Transfer Umum	524,2	158,4	30,2	5,5	544,7	142,3	26,1	(10,2)
1) DBH	106,4	20,0	18,8	18,2	117,6	12,3	10,5	(38,4)
2) DAU	417,9	138,4	33,1	3,9	427,1	130,0	30,4	(6,1)
- Dana Transfer Khusus	200,4	17,6	8,8	(11,3)	202,5	24,8	12,2	40,7
1) DAK Fisik	69,3	-	-	-	72,2	0,0	0,1	-
2) DAK Nonfisik	131,0	17,6	13,5	(11,2)	130,3	24,8	19,0	40,4
b. DID	10,0	5,0	50,0	85,1	15,0	-	-	-
c. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	22,2	0,2	0,8	(93,0)	22,7	0,2	0,9	-
2. Dana Desa	70,0	10,1	14,4	(1,9)	72,0	7,2	10,0	(28,6)
JUMLAH	826,8	191,3	23,1	3,1	856,9	174,5	20,4	(8,8)

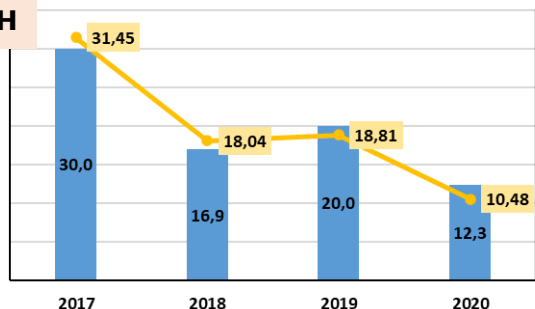
Hal krusial di Maret 2019 sebagai akibat pandemi Covid19

- Refocusing 25% DTU untuk infrastruktur dan DBH CHT agar dapat digunakan sebagian/seluruhnya utk penanganan pandemic COVID-19
- Relaksasi penyaluran BOK untuk segera bisa digunakan mendukung penanganan COVID-19
- Refocusing dan realokasi DAK Fisik Kesehatan untuk penanganan COVID-19
- Penghentian seluruh proses pengadaan DAK Fisik di luar bidang Pendidikan dan Kesehatan

REALISASI TKDD

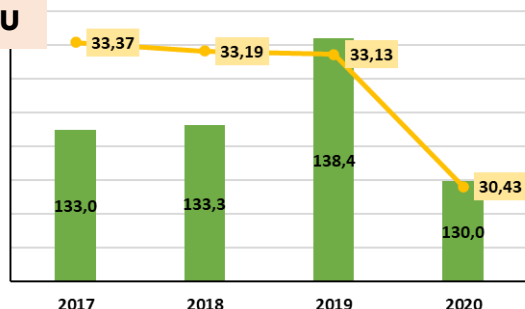
TKDD mendorong peningkatan pendapatan daerah yang perlu diimbangi dengan peningkatan pelaksanaan belanja daerah

DBH



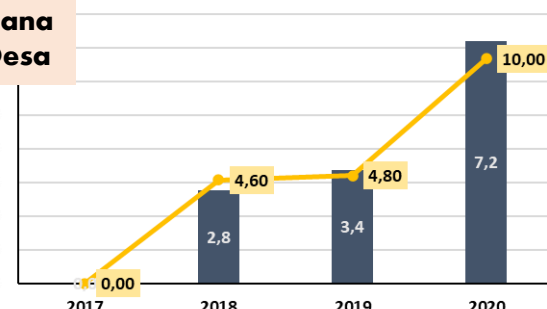
Growth rata-rata 4 tahun -21,26% (2020:-38,39%)

DAU



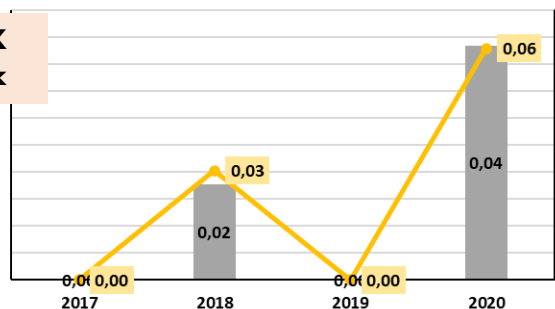
Growth rata-rata 4 tahun -0,68% (2020:-6,10%)

Dana Desa



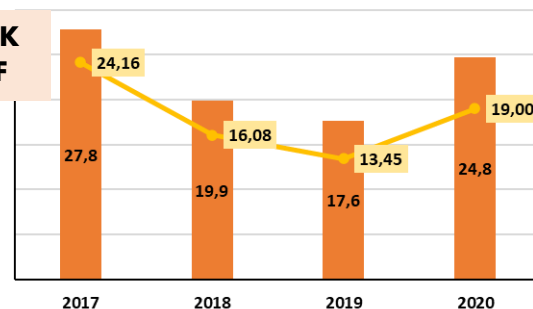
Growth rata-rata 4 tahun 78,67% (2020: 114,11%)

DAK Fisik



Growth rata-rata 4 tahun 33,33% (2020:100,00%)

DAK NF



Growth rata-rata 4 tahun 0,21% (2020:40,43%)

Realisasi Pembiayaan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN

Hingga akhir Maret Pembiayaan Utang mencapai 21,7% dari APBN 2020, namun kedepannya akan mengalami tantangan karena rendahnya likuiditas akibat ketidakpastian dan *flight to safe haven*.

Pembiayaan Anggaran (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
1. Pembiayaan Utang	359,3	178,6	49,7	18,6	351,9	76,5	21,7	(57,2)
a. SBN (neto)	389,0	185,8	47,8	27,8	389,3	83,9	21,6	(54,8)
b. Pinjaman (Neto)	(29,7)	(7,3)	24,5	(240,3)	(37,5)	(7,4)	19,8	2,1
2. Pembiayaan Investasi	(75,9)	(2,0)	2,6	-	(74,2)	(3,0)	4,0	50,0
3. Pemberian Pinjaman	(2,4)	1,3	(56,6)	(13,2)	5,2	1,0	19,0	(25,8)
4. Kewajiban Penjaminan	-	-	-	-	(0,6)	(0,4)	71,3	-
5. Pembiayaan Lainnya	15,0	0,0	0,0	(88,2)	25,0	0,2	0,6	
JUMLAH	296,0	177,9	60,1	16,9	307,2	74,2	24,2	(58,3)

Stimulus Yang Diberikan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN STIMULUS 1 DAN STIMULUS 2 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK COVID-19

Stimulus 1 Melalui Belanja Untuk Memperkuat Perekonomian Domestik Tahun 2020 dan

Percepatan Belanja dan Kebijakan Mendorong Padat Karya

Percepatan pencairan Belanja Modal

- Percepatan Penetapan Pejabat perbendaharaan negara (KPA, PPK dan Bendahara)
- Percepatan Pelaksanaan Tender
- Percepatan Revisi dan Pencairan anggaran strategis
- Antisipasi ketersediaan kas (*cash management & fiscal buffer*)
- Antisipasi keterbatasan kapasitas pihak ketiga

Percepatan pencairan Belanja Bantuan Sosial

- Percepatan pencairan PBI JKN (Feb, Mar, dan April dicairkan pada Bulan Februari)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.

Perluasan Kartu Sembako

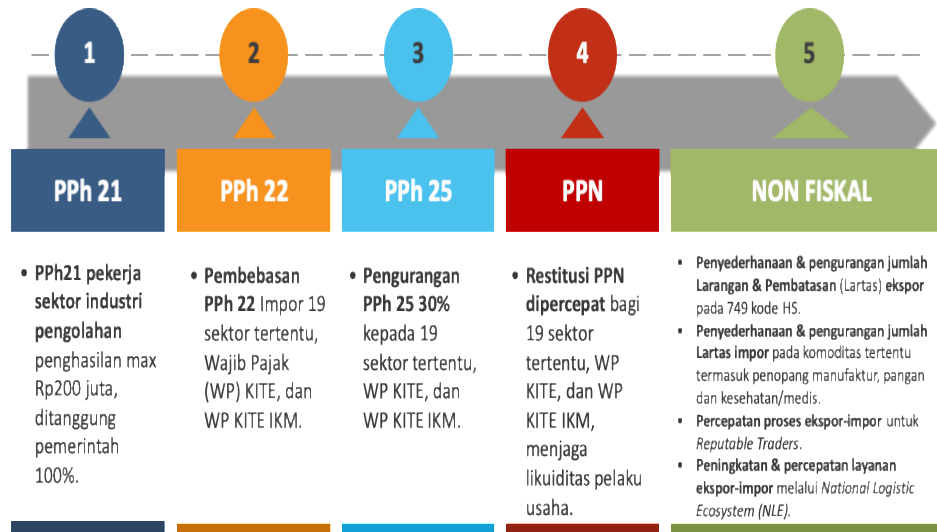
- Menambah manfaat kartu sembako

Stimulus Belanja

Insentif Sektor Pariwisata bantu aktivitas terdampak - pariwisata

- Insentif untuk travel agent yang membawa wisatawan mancanegara
- Insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata

Stimulus 2 Fokus Pada Menjaga Daya Beli Masyarakat Dan Kemudahan Ekspor - Impor



Stimulus nomor 1-4 berlaku untuk April s.d. Sept. 2020

STIMULUS LANJUTAN TAMBAHAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK COVID-19 SERTA MENCEGAH KRISIS EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Kesehatan

Intervensi untuk penanganan Covid dan Subsidi Iuran BPJS

- Bantuan iuran penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja akibat keputusan yudisial review MA atas Perpres 75 Tahun 2019
- Insentif tenaga medis pusat dan daerah untuk 6 bulan: Dokter spesialis, dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Santunan Kematian untuk tenaga kesehatan
- Belanja Penanganan Kesehatan untuk Covid-19: Alat kesehatan (APD, Rapid Test, Reagen); Sarana dan prasarana kesehatan; Dukungan SDM

3. Dukungan Industri

Cadangan Perpajakan/DTP Lainnya

- Pajak ditanggung Pemerintah untuk PPH Ps.21 dan PPN
- Bea Masuk DTP

Stimulus KUR

4. Dukungan Untuk Dunia Usaha

Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk untuk Ultra Mikro

2. Social Safety Net

Tambahan Jaring Pengaman Sosial

- Penambahan penyaluran PKH untuk 10 jt KPM → Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi per bulan mulai April; Bulan April s.d Juni, KPM menerima PKH 2 kali
- Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM)
- Bantuan Sembako untuk DKI (1,3 juta KK) dan Bodetabek (600 rb KK) senilai Rp600rb/bulan selama 3 bulan
- Bantuan Sosial tunai untuk 9 juta KK (non Jabodetabek) senilai Rp600rb/bln selama 3 bulan
- Tambahan Kartu Pra Kerja → Program pra kerja diperluas untuk 5,6 juta orang pekerja
- Pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA → selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan RT 450 VA dan 7 juta pelanggan RT 900 VA
- Tambahan Insentif Perumahan bagi MBR → Subsidi Selisih Bunga dan bantuan uang muka untuk 175 rb unit
- Program Jaring Pengaman Sosial Lainnya

Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik

Penyesuaian anggaran Pendidikan untuk penanganan Covid-19

PASCA PENETAPAN PERPRES 54/2020 → DILAKUKAN PENGHEMATAN LANJUTAN BELANJA K/L DAN PELAKSANAAN REFOCUSING UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Penghematan lanjutan Belanja K/L

- a. Belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional, dan belanja barang diserahkan ke pemda/masyarakat yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19, atau tidak sesuai dengan tugas & fungsi (tusi) K/L
- b. Belanja modal untuk proyek/kegiatan yang dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari *single-year* menjadi *multi years*, dan yang proyek *multi-years* diperpanjang ke tahun berikutnya).

Melanjutkan refocusing anggaran internal untuk penanganan covid-19

Pemanfaatan hasil refocusing (untuk penanganan covid-19)

- a. Pengadaan sanitizer, masker, dan bahan lain pencegah Covid-19 kebutuhan internal K/L (jumlah/harga dapat dipertanggung-jawabkan). APD berstandar medik hanya untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19
- b. Pemberian bantuan ke masyarakat, disesuaikan dengan tusi K/L, tidak duplikasi dengan K/L lain, dalam jumlah dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Tidak untuk menambah pendapatan (*take home pay*) aparatur, kecuali sudah diatur atau diijinkan Menteri Keuangan
- d. Pembelajaran online dan untuk pemberdayaan fakultas terkait (kedokteran, kesehatan masyarakat), serta rumah sakit Pendidikan yang dimiliki KL
- e. Memperkuat penanganan covid-19 pada faskes/RS yg dikelola KL

KEBIJAKAN TKDD DAN PENGELOLAAN APBD DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Refokusing dan realokasi TKDD untuk penanganan Covid19

- Refokusing penggunaan DTU utk penanganan covid19
- Realokasi DID kategori Kesehatan utk penanganan covid19
- Refokusing dan realokasi DAK Fisik Bid Kesehatan utk pengadaan ruang isolasi, ventilator, mobile xray
- Refokusing BOK utk pengadaan APD Puskesmas, surveillance dan pengiriman specimen covid19
- Refokusing Dana Desa utk BLT bagi masy miskin di Desa

Penyesuaian Alokasi TKDD melalui Perpres 54/2020

- Penyesuaian DBH sesuai penurunan penerimaan negara
- Pemotongan DAU 10% dan penyesuaian besaran dana Otsus
- Penghentian pengadaan barang/jasa DAK Fisik non Pendidikan dan kesehatan
- Penyesuaian alokasi DAK Non Fisik sesuai sisa kas yg ada di daerah dan penambahan BOK Tambahan untuk insentif tenaga medis

Pemotongan TKDD digunakan dan dialihkan untuk penanganan covid19 secara terpusat (pengadaan APD, biaya pasien covid, insentif tenaga medis, tambahan bansos PKH dan sembako, diskon tarif listrik 450 & 900 VA, insentif UMKM, dll).

Refocusing, realokasi dan penyesuaian belanja APBD (SKB Mendagri & Menkeu)

- Pemotongan Belanja Pegawai utamanya Tukin yg berlebihan dan honorarium
- Pemotongan Belanja Barang/Jasa min 50% (utamanya yg tidak produktif)
- Pemotongan Belanja Modal min 50% (utamanya yg kurang urgent saat ini)
- Pengalihan belanja ke penanganan covid19, spt bidang kesehatan dan bansos-2 untuk masy berpenghasilan rendah dan insentif UMKM

Note:

* Angka perkiraan, eksekusi tergantung kebijakan di Daerah

Terima Kasih



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Progres Pelaksanaan Kebijakan Refocusing dan Stimulus Fiskal

(per 16 April 2020)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Stimulus I dan II - Perkembangannya

No	Kebijakan Stimulus	Perkembangan
STIMULUS I		
1	Perluasan Kartu Sembako untuk peningkatan manfaat kartu sembako (Rp150 rb/bulan → Rp200 rb/bulan)	Telah dilaksanakan oleh Kemensos per Maret 2020.
2	Perluasan sasaran subsidi bunga perumahan dengan tambahan volume rumah sekitar 175 ribu unit rumah	▪ Saat ini proses penyusunan aturan pelaksanaan seperti Permen PUPR dan Kepmen PUPR ▪ Revisi DIPA masih dalam proses berdasarkan usulan Kemen PUPR ▪ Kontrak dengan Bank Pelaksana direncanakan April 2020
3	Insentif sektor pariwisata bantu aktivitas terdampak pariwisata berupa insentif untuk travel agent, insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata, dan dukungan ke daerah untuk pariwisata	a. Standar Biaya untuk insentif travel agent and tenaga pemasaran pariwisata sudah ditetapkan (Surat Menkeu No 4140/MK/2020) b. Diskon tiket belum dapat dilaksanakan karena adanya kondisi wabah covid-19 c. Pengurangan tarif PJP2U (Pelayanan Jasa penumpang Pesawat Udara) sebesar 20% dari tarif normal, untuk 25% seat pada 10 destinasi wisata masih menunggu penetapan Perpres
STIMULUS II		
	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan PPh Pasal 25, Restitusi PPN dipercepat	Telah diterbitkan PMK Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Stimulus Lanjutan Bidang Kesehatan (1)

No	Kebijakan Stimulus	Perkembangan
1	Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan	- Telah terbit Surat Menkeu No. S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 terkait ketentuan besaran tertinggi insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 - Kemenkes telah menghitung exercise anggaran untuk pemberian insentif bagi nakes (pusat dan daerah) sebesar Rp5,9 T dan santunan kematian sebesar Rp3 M untuk selama 4 bulan. - Sedang disusun PerMenkes terkait pengaturan/petunjuk teknis atas kriteria dan mekanisme pemberian insentif dan santunan
2	Bantuan iuran BPJS Kesehatan (JKN) bagi peserta PBP dan BP	- RPerpres tentang Jaminan Kesehatan Nasional selesai harmonisasi. - Pemberian bantuan iuran kepada peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas III agar pelayanan kesehatan standar tetap berjalan

Stimulus Lanjutan Bidang Kesehatan (2)

No	Kebijakan Stimulus	Perkembangan
3	Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19	- Surat Penugasan Khusus Menko PMK No. S-22/MENKO/PMK/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada BPJS Kesehatan untuk verifikasi klaim/tagihan pelayanan kesehatan pasien Covid-19 dari Faskes Rujukan (FKRTL) yang ditunjuk Pemerintah sebagai rujukan penanganan Covid-19. - Standar Biaya Penggantian atas Biaya Perawatan Pasien Penyakit Covid-19 ditetapkan Menkeu melalui Surat No. S-275/ MK.02/2020 tanggal 6 April 2020 (berdasarkan usulan Menkes pada surat No. HK.01.07/Menkes/226/2020 tgl 3 Apr) - Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19 ditetapkan melalui Kep Menkes No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tanggal 6 April 2020.
4	Penyediaan APD, alat kesehatan, bahan pemeriksaan, obat-obatan, dan sarpras kesehatan lainnya untuk penanganan Covid-19	- Kebutuhan menyeluruh untuk tingkat nasional (jenis dan jumlah alat kesehatan, bahan pemeriksaan, dan sarpras kesehatan lainnya) masih proses perhitungan Kemenkes - Melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan 351.750 APD ke 34 Provinsi dan penyediaan alat dan bahan pemeriksaan specimen, serta alat kesehatan di RS dengan total anggaran sebesar Rp356,1 M.

Perkembangan Stimulus Lanjutan Bidang SSN (1)

No	Kebijakan Stimulus	Perkembangan
1	Tambahan untuk perubahan mekanisme Penyaluran PKH untuk 10 jt KPM menjadi tiap bulan	- Saat ini dalam proses perencanaan kas di KPPN - Siap disalurkan mulai minggu ke-3 April 2020
2	Tambahan Program Kartu Sembako untuk 4,8 jt (total penerima menjadi 20 jt KPM) Rp200 rb/bln	- Telah diperoleh data untuk 4,8 juta KPM - Sedang dilakukan proses pembukaan rekening secara kolektif (Burekol) bagi 4,8 juta KPM - Penyaluran direncanakan mulai minggu ke-3 April 2020
3	Bansos Khusus untuk DKI (1,3 juta KK) dan Bodetabek (600 rb KK) senilai Rp600rb/bulan selama 3 bulan (Rp3,42 T)	Proses revisi DIPA telah selesai, bantuan akan disalurkan oleh Kemensos paling lambat minggu ketiga April
4	Bantuan Sosial tunai untuk 9 juta KK (non Jabodetabek) senilai Rp600rb/bln selama 3 bulan	Proses revisi DIPA telah selesai, bantuan akan disalurkan oleh Kemensos paling lambat minggu ketiga April

Perkembangan Stimulus Lanjutan Bidang SSN (2)

No	Kebijakan Stimulus	Perkembangan
5	Tambahan kartu pra kerja	▪ DIPA telah diterbitkan (Rp10 T) ▪ Telah dilaunching 11 April 2020, dengan penerimaan 164 ribu peserta per batch per minggu ▪ 5,9 juta calon peserta sudah mulai mendaftar dan lolos verifikasi (siap gabung batch 2,1 juta (per 16 April 2020 pukul 16.20) ▪ Peserta batch 1 diumumkan 17 April 2020 ▪ Kerja sama dengan mitra platform digital (Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker)
6	Diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA	▪ Pemberian diskon sudah dilaksanakan ✓ Pelanggan PascaBayar → tagihan otomatis disesuaikan diskon ✓ Pelanggan Pra Bayar → melalui media, a.l. website dan Whatsapp PLN (Per 9 April 2020, 11,4 juta token kWh berhasil di-generate) ▪ Revisi DIPA masih dalam proses

Ringkasan Monitoring Progres Revisi Anggaran Terkait Penanganan Covid 19

Per 16 April 2020

NO.	K/L	STATUS REVISI	PERUNTUKAN	NILAI REVISI (Rp Miliar)
1	BNPB	Revisi DJA selesai	Penanganan awal COVID-19, kebutuhan gugus tugas dan kemenkes (rincian terlampir)	3.141,43
2.	Kementerian Sosial	Revisi di DJA selesai	1. Tambahan PKH, Kartu Sembako, BLT Jabodetabek, dan BST Non Jabodetabek 2. Pengadaan alat pencegahan penyebaran covid-19	43.897,71
3.	Kementerian Kesehatan			508,81
	- Pusat Krisis	Revisi selesai	Pengadaan bahan dan alat pengendalian krisis COVID-19, mobilisasi logistik dan Nakes	12,07
	- Ditjen Farmalkes	Revisi DJA selesai	penyediaan dan distribusi bufferstock obat perbekes Pusat dan Provinsi dlm rangka percepatan penanganan Covid-19.	16,00
	- Ditjen P2P	Revisi POK	Penyediaan bahan pemeriksaan, operasional pengambilan sampel spesimen dan surveilans faktor resiko penyakit Covid-19 dan operasional petugas	27,82
	- Eselon I Lain	Masih proses internal	Pengadaan APD, bahan dan alat pengendalian krisis Covid-19	452,92

Ringkasan Monitoring Progres Revisi Anggaran Terkait Penanganan Covid 19

NO.	K/L	STATUS REVISI	PERUNTUKAN	NILAI REVISI (Rp MILIAR)
4.	Kementerian PUPR	Akan mengusulkan revisi antarProgram	untuk memenuhi tanggap darurat I pembangunan sarpras observasi/penanganan/karantina pasien serta fasilitas pendukung penanganan wabah covid-19 di Pulau Galang Kota Batam	400,00
5.	BPOM	Revisi POK	Penyediaan sarpras (APD, disinfektan, test kit, thermo gun, serta penambah daya tahan tubuh, dll) dalam rangka perlindungan atau penanganan ASN dan masyarakat penerima layanan BPOM terhadap wabah Covid-19	4,61
6.	Kem. Desa PDT	Masih 3 dari 9 unit Es 1 dalam proses penyelesaian	Pengadaan alat kesehatan untuk mencegah COVID-19	21,60
7.	Kementerian Luar Negeri	Proses internal Kemenlu	Pemulangan WNI (evakuasi)	100,00
8.	Kementerian Pertahanan	Revisi DJPb selesai	Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan (Alat Peralatan Pertahanan)	80,33
9.	POLRI	Proses penelaahan	APD untuk penanganan Covid-19	10,00
10.	Kementerian Tenaga Kerja	Revisi POK dan DJA (menunggu SE Efisiensi)	Publikasi, edukasi Covid-19, Fasilitasi pemeriksaan Covid-19 bagi pekerja, dan disinfektasi di perusahaan	16,63